

Bakri La Suhu
Abdul Halil Hi Ibrahim



KONSPIRASI ELIT **DIBALIK** **PEMEKARAN** **DAERAH**

Editor:
Abdullah Kaunar
Rasid Pora



Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bejongsari - Purbalingga 53362



UNIVERSITAS JEMBER (UJ)
DINAS JEMBER KOTA (DJK)
ECC0202264295



ISBN 978-629-447-138-9

9 786234 871388

KONSPIRASI ELIT DIBALIK PEMEKARAN DAERAH

Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

KONSPIRASI ELIT DIBALIK PEMEKARAN DAERAH

Penulis : Bakri La Suhu, S.IP.,M.A
Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Adil Muallim

ISBN : 978-623-487-138-8

No. HKI : EC00202264295

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,**
AGUSTUS 2022
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp.
0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Buku **“KONSPIRASI ELIT Dibalik PEMEKARAN DAERAH”**. Buku ini merupakan hasil riset penulis saat menyelesaikan Program Magister (S2) pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Buku ini juga secara spesifik berkaitan langsung dengan Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah; terjadinya dinamika Pro dan Kontra Pemekaran Daerah Kepulauan Obi, selayang padang Pulau Obi, munculnya Pro-kontra dan Konspirasi di antara Elit dalam Pemekaran Daerah Kepulauan Obi serta Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Daerah.

Sukses dan berhasilnya penulisan karya buku ini sebagai bagian dari inovasi dan motivasi penulis dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Pendidikan/ pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, lebih khusus lagi pada aspek penelitian. Karya buku ini juga, dapat dijadikan bahan kuliah dan atau referensi untuk akademisi, mahasiswa, politisi ataupun para pembaca dalam memahami dan mendalami kajian tentang pemekaran daerah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UMMU dan Wakil Rektor I UMMU atas dukungannya kepada penulis, baik dalam bentuk moril maupun material serta Keluarga besar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMMU. Sembah sujudku kepada Kedua Orang Tua dan Keluarga yang telah mendidik penulis dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayangnya, doa restu, perhatian, motivasi, harapan dan pengorbanannya

selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya Buku ini sesuai rencana yang ditargetkan.

Harapan penulis, semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian dalam Ilmu Pemerintahan serta proses perjalanan pemekaran daerah pada suatu wilayah. Tentu dalam penulisan karya Buku ini masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang sifatnya konstruktif dari semua kalangan demi penyempurnaan karya Buku ini kedepannya.

Ternate, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	iii
DAFTAR ISI.....	v
Bagian 1 DINAMIKA ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI (Perspektif Normatif & Teoritik)	1
A. Pendahuluan	1
B. Refleksi Teori	9
Bagian 2 SELAYANG PADANG PULAU OBI	50
A. Letak Geografis.....	50
B. Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan	51
C. Sumber Daya Alam.....	51
D. Transportasi Kepulauan Obi.....	52
E. Penerimaan Daerah Kepulauan Obi.....	54
F. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya	56
G. Kehidupan Sosial Politik	58
H. Rentang Kendali.....	60
Bagian 3 PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI.....	67
A. Elit Pro Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi...67	
B. Analisa Elit Kontra Pemekaran dan Kepentingannya	71
C. Persaingan Kelompok Elit Pro Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.....	73
D. Latar Belakang Konspirasi Elit Pro & Kontra Pemekaran	91

Bagian 4 KONFIGURASI ELITE DALAM PEMEKARAN	
KABUPATEN KEPULAUAN OBI	96
A. Pengantar	96
B. Aspek Geografis.....	97
C. Aspek Etnisitas	102
D. Aspek Agama	106
E. Kesimpulan.....	109
DAFTAR PUSTAKA	112

Bagian

1

DINAMIKA ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI (*Perspektif Normatif & Teoritik*)

A. Pendahuluan

Kehadiran otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi daerah serta memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian direvisi menjadi UU No. 23/2014 yang merupakan pengganti dari UU No. 22/1999 sebagai legal formal dari pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat dari keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan segala kewenangannya membawa banyak implikasi di lapangan. Salah satu implikasi yang menonjol serta terus berlangsung sampai sekarang adalah keinginan berbagai daerah-daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk memekarkan wilayahnya membentuk daerah otonom yang baru.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dalam penjelasannya menyatakan bahwa tujuan pemekaran daerah senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat;
3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. peningkatan keamanan dan ketertiban; dan
6. peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Untuk itu, pembentukan daerah/wilayah baru harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Perkembangan pemekaran daerah yang ada sekarang ini, harapan yang ada tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut sehingga cenderung mengalihkan tujuan dari dibuatnya kebijakan pemekaran daerah. Lahirnya euforia pemekaran wilayah juga cukup mengkhawatirkan, karena banyak usulan pemekaran daerah hanya dilandaskan pada persoalan-persoalan yang kurang substansial. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya daerah-daerah otonom baru justru menimbulkan

masalah, misalnya muncul konflik horizontal antar masyarakat daerah dan konflik vertikal antara daerah pemekaran dengan daerah induk, infrastruktur yang belum tersedia, pegawai/birokrasi dan sarana perkantoran sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan yang belum tersedia serta paling penting pembiayaan untuk mendanai proses penyelenggaraan pemerintahan masih bergantung pada daerah induk atau pemerintah pusat.

Dengan kata lain pemekaran wilayah yang ada cenderung menjadi beban baik untuk pemerintah induk ataupun pemerintah pusat. Jika persoalan ini dicermati dengan baik, banyak pemekaran daerah baru terwujud karena adanya kepentingan politik segelintir orang saja tanpa memperhatikan dimensi-dimensi yang ada di wilayah tersebut, dimensi dimaksud baik berupa dimensi politik, dimensi administrasi/ teknis dan dimensi kesenjangan antar wilayah.

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa studi tentang pemekaran daerah yang komprehensif telah dilakukan berbagai peneliti. Ode Jamal mengenai Elit dan Pemekaran di Papua : Kajian Tentang Dinamika Respon Elit Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Provinsi Jaya Barat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa ternyata muncul respon yang berbeda dari elit MRP (Majelis Rakyat Papua), yaitu antara yang mendukung dan yang kontra terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tersebut. Bagi yang mendukung pembentukan Provinsi Jaya Barat, mereka adalah kelompok elit MRP (Majelis Rakyat Papua) yang berasal dari regional bagian Papua Barat. Sedangkan bagi elit MRP (Majelis Rakyat Papua) yang berasal dari regional bagian Papua Timur (Provinsi Induk) dan wilayah bagian

regional Papua Tengah cenderung bersikap kontra. Namunpun demikian, bukan berarti tidak ada dari tiap kelompok ini yang secara liberal atau antagonis dalam merespon pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Terpolarisasinya elit MRP (Majelis Rakyat Papua) ke dalam tiga wilayah regional, hal ini juga cenderung menunjukkan terfragmentasinya elit berdasarkan wilayah etnisitas.¹

Selain itu, Syafarudin mengenai Rasionalitas Elite Dalam Penataan Daerah: Distribusi Vs Akumulasi (Studi Kasus Usulan Pemekaran Kabupaten Lampung Utara dan Kerja sama Pembangunan Jembatan Selat Sunda di Aras Lokal Provinsi Lampung). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di balik argumentasi elite mendorong distribusi atau akumulasi yang seolah-olah berbeda bentuk dan berlawanan, sebenarnya itu semua digerakan oleh nalar yang sama yakni aktualisasi kekuasaan elite. Para elite yang sudah memiliki kekuasaan dan legitimasi berupaya menampakkan peran, tugas, kepentingan, dan pengaruhnya dalam penataan daerah. Bekerjanya nalar aktualisasi kekuasaan elite pada arena politik distribusi dan akumulasi ditandainya dengan keterlibatan mereka dalam proses formulasi kebijakan dan pembentukan opini.²

Dari studi yang disebutkan di atas, telah menunjukkan apa yang terjadi dengan pemekaran daerah selama ini. Studi

¹ Ode Jamal, 2009. Tesis ; Elit dan Pemekaran di Papua : *Kajian Tentang Dinamika Respon Elit Majelis Rakyat Papua Dalam Pembentukan Provinsi Jaya Barat*, Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM.

² Syafarudin, 2009. Tesis : *Rasionalitas Elite Dalam Penataan Daerah: Distribusi Vs Akumulasi (Studi Kasus Usulan Pemekaran Kabupaten Lampung Utara dan Kerja sama Pembangunan Jembatan Selat Sunda di Aras Lokal Provinsi Lampung)*. Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM.

yang peneliti lakukan, menyoroti pada konfigurasi elit dalam pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi di Kabupaten Halmahera Selatan. Sehingga hasil yang diharapkan dapat mengetahui bagaimana konfigurasi elite yang dilakukan dalam pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi, baik dari aspek etnisitas, aspek geopolitik dan aspek agama. Selain itu, sepanjang pengetahuan peneliti belum ada studi mengenai konfigurasi elit dalam pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Obi, atau setidaknya ada perbedaan dari sisi metodologi penelitian dan kerangka pikir yang digunakan.

Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sudah di deklarasikan tanggal 20 Maret 2008 bersamaan dengan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Halmahera Selatan yang bertempat di Laiwui Kecamatan Pulau Obi. Deklarasi pemekaran kabupaten Kepulauan Obi mendapat respon dan disetujui oleh DPRD yang diwakili oleh Ketua DPRD (Bahrain Kasuba dari Partai PKS asal etnis Tobela) dan beberapa anggota DPRD yang berasal dari Kepulauan Obi yang etnisnya dari Suku Buton (La Jaya dari Partai Patriot, Idhar La Masa dari Partai Golkar, Hi Ibrahim dari Partai PBR, Rudi dari Partai PKB, Hi Amin dari Partai PKS, dan Rosihan dari Partai PKS), sementara pihak pemerintah dalam hal ini Bupati tidak ikutserta dalam deklarasi tersebut.

Namun tuntutan pemekaran daerah mendapat tantangan dari berbagai pihak. Disatu pihak, pemekaran ini dimaksudkan untuk memperpendek jarak pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pihak ini mengatasnamakan pro pemekaran yang didalamnya masyarakat Obi secara keseluruhan. Sedangkan di pihak lain, jika Kepulauan Obi

dimekarkan menjadi kabupaten otonomi baru maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang. Karena wilayah kepulauan Obi merupakan sebagian dari pendapatan asli daerah terbesar di Kabupaten Halmahera Selatan, selain itu juga kepentingan sumber daya alam di Wilayah Kepulauan Obi menjadi dasar terjadinya kontra pemekaran. Pihak yang kontra atas pemekaran berasal dari luar kepulauan Obi.

Pihak-pihak yang pro-kontra atas pemekaran, terjadi dikalangan elit yang ada di daerah. Di pihak pro pemekaran terdapat berbagai elit yang ada dalam masyarakat baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi dan para birokrat, sehingga tuntutan pemekaran menjadi basis utama untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya. Elit-elit tersebut menjadi motor penggerak pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi, yang ingin melepaskan diri dari kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan, elite yang kontra pemekaran berasal dari luar Obi. Elit ini memiliki sumber daya-sumber daya (*resource*) dalam segala hal, baik kekuasaan, kehormatan, kekayaan, dan sebagainya. Elit yang kontra pemekaran ini memiliki kepentingan di wilayah Obi, sehingga terjadi tarik-menarik tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi. Sementara itu, pro-kontra antara elit-elit dimaksud pada tatanan kepentingan masing-masing untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya (*resource*) yang ada di wilayah Obi. Potensi daerah yang dimiliki wilayah Obi terdiri dari 4 (empat) sektor yaitu sektor pertambangan, perikanan, perkebunan khususnya cengkeh, pala, dan kelapa serta sektor pariwisata unggulan.

Selain terjadi pro-kontra pemekaran di kalangan elit yang ada di daerah, terjadi pula konspirasi elit di Kabupaten

Halmahera Selatan, antara elite pro; Abu Karim La Tara, S.IP/ Camat Obi, Hi Subur/Pengusaha Obi dan elite kontra pemekaran yakni Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba. Konspirasi yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan dan mengamankan usaha bisnis (kepentingan ekonomi) di wilayah Kepulauan Obi. Pihak kontra pemekaran memiliki 20 % saham di 3 (tiga) perusahaan Nikel³ yang beroperasi di Kepulauan Obi, kepentingan ekonomi ini yang membuat terjadinya kontra pemekaran dan tidak mau melepaskan Obi menjadi Kabupaten baru. Sedangkan pihak pro pemekaran dimaksud, masing-masing memiliki perusahaan yang ada di wilayah Kepulauan Obi.

Kondisi geografis wilayah Obi sebagai daerah kepulauan dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang sama, baik dari segi mata pencaharian (Petani dan Nelayan), pekerjaan dalam kehidupan keseharian (Birokrasi, Pendidik, dan Politisi), kehidupan sosial-budaya masyarakat yang menyatu dan mengikat antara beberapa etnis dan agama yang berdasarkan akulturasi dan hubungan primordial sebagai daerah kepulauan serta rentang kendali yang jauh dari pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Induk (Halmahera Selatan), maupun kesenjangan wilayah di Kepulauan Obi merupakan dasar pijakan untuk menuntut pemekaran daerah otonom baru. Ketika memperjuangkan

³ Perusahaan yang beroperasi di Kawasan Pulau Obi sekitar 31 perusahaan, dan semuanya di sektor pertambangan. Ketiga perusahaan Nikel milik Bupati tersebut yaitu PT. Gane Permai Sentosa (GPS), PT. Gane Tambang Sentosa (GTS), dan Trimega Bangun Persada, sedangkan Abu Karim La Tara, S.IP punya Perusahaan Nikel yaitu PT. Obi Putra Mandiri, dan Hi. Subur punya Perusahaan Emas yaitu PT. Berkat Karya Mandiri.

pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi, elit Obi terpolarisasi berdasarkan aspek geografis, etnisitas, dan agama. Konfigurasi elit dalam pemekaran ternyata terjadi perpaduan diantara dua aspek yakni etnisitas dan agama, sedangkan aspek geografis terjadi perbedaan elit-elit Obi. Perbedaan kepentingan elit antara wilayah Pulau Obi, wilayah Labuha-Bacan, dan elit di Ternate menimbulkan persaingan di antara pro pemekaran. Persaingan elit pro pemekaran merupakan bagian dari kepentingan masing-masing elit untuk berebut pengaruh dan dukungan dari masyarakat, mempertahankan dan mendapatkan sumberdaya atau distribusi kekuasaan dalam pemekaran nanti.

Proses sementara pemekaran daerah/wilayah Kabupaten Kepulauan Obi menunggu hasil Kajian Akademik oleh Universitas Indonesia (UI). Tim studi kelayakan pemekaran Obi dari Universitas Indonesia sudah mengunjungi Obi pada hari Senin, 2 Mei 2011. Menurut Tim Universitas Indonesia yang di Ketua Drs. Muhammad Azis Muslim, M.Si, seluruh administrasi Pemekaran Obi sudah lengkap dan menjamin pemekaran Obi menjadi satu kabupaten baru bakal terwujud.⁴ Setelah hasil kajian akademik, ditandaklanjuti ke Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk dibahas secara internal dan membuat keputusan mengenai menyetujui atau menolak usul pemekaran daerah Kepulauan Obi. Apabila disetujui, maka Mendagri mengajukan usul pembentukan daerah beserta RUU pembentukan daerah kepada Presiden, yang jika mendapat persetujuan lalu diteruskan kepada DPR RI untuk

⁴ Maluku Utara Post (Malut Post), 2011. *Akui Administrasi Lengkap Tim UI Kunjungi Obi*. Selasa, 03 Mei 2011.

dibahas. Jadi, proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi masih membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi daerah otonom baru.

B. Refleksi Teori

1. Tinjauan Pemekaran Daerah Secara Normatif

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah⁵.

Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

⁵ Penjelasan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa⁶.

Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, sedangkan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 dijelaskan bahwa “Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun penjelasan syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Syarat administratif pembentukan daerah kabupaten/kota dimaksud, meliputi:
 - 1) Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - 2) Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - 3) Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;
 - 4) Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan
 - 5) Rekomendasi Menteri.
- b. Syarat teknis sebagaimana dimaksud meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,

⁶ Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. hal.48.

keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- c. Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah untuk:
 - 1) Pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
 - 2) Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
 - 3) Pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 juga dijelaskan Tata cara pembentukan daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;

- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
- d. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/ kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/ kota;
 - 2) Hasil kajian daerah;
 - 3) Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
 - 4) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi; g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - 1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/ kota;
 - 2) Hasil kajian daerah;
 - 3) Peta wilayah calon kabupaten/kota;

- 4) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
- 5) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Selanjutnya dalam Pasal 17 dijelaskan Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
- b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain;
- c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
- d. Masing-masing bupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada

gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

- 1) Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - 2) Hasil kajian daerah;
 - 3) Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
 - 4) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi;
- g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan
- h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
- 1) dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - 2) hasil kajian daerah;
 - 3) peta wilayah calon kabupaten/kota;
 - 4) Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota; dan
 - 5) Keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu. Pasal 49 menjelaskan bahwa :

- a. Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya usaha pemekaran suatu daerah menjadi dua atau lebih tidak dilarang, asalkan didukung oleh keinginan sebagian besar masyarakat dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik wilayah. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selain dari sisi normatif dalam pembentukan daerah otonom, dari sisi lain pemekaran daerah harus memperhatikan berbagai dimensi-dimensi yang dianggap paling mendasar dalam pemekaran daerah. Dimensi-dimensi tersebut yaitu dimensi politik, dimensi administrasi/teknis dan dimensi kesenjangan wilayah. Adapun penjelasan dimensi-dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁷ :

a. Dimensi Politik

Pembentukan daerah otonom merupakan fenomena umum atau kebutuhan universal. Penyebaran kekuasaan atau otoritas kepada komunitas lokal untuk mengambil keputusan tertentu dan melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi suatu kebutuhan dalam negara-negara modern. Di negara yang besar akan menjadi lebih tepat, lebih efisien dan efektif untuk melimpahkan sebagian kewenangan yang dipegang pemerintah pusat kepada suatu entitas lokal yang membentuk pemerintahan daerah. Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik, sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik.

Dalam dimensi politik desentralisasi ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya pemekaran daerah, diantaranya yaitu :

⁷ M. Zaki Mubarak, 2006. *lue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center). hal. 120-130.

1) Faktor Geografi

Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah aspek yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik antara masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Ikatan-ikatan tersebut, dapat saja dilatar belakangi oleh kesatuan geografis maupun sejarah, sehingga masyarakat merasa dihubungkan oleh suatu ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan politis.

Faktor geografis, yaitu faktor mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Masyarakat terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat. Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom. Keadaan geografi berpengaruh kuat, sehingga dipakai menjadi suatu konsep dalam pembentukan daerah otonom. Konsep pemberian otoritas kepada daerah karena dengan adanya sejumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dimana kelompok itu mempunyai perbedaan dan kepentingan.

2) Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

Pemerintahan daerah dari perspektif sosial dipandang sebagai kelompok yang terorganisir di dalam batas-batas geografi tertentu, dan mengembangkan perasaan kebersamaan di tengah perbedaan sosial ekonomi dengan corak tertentu dan menjadi "*social entity*" (Mutalib, 1987). Daerah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang pada gilirannya membentuk keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang menyatu sebagai konsekuensi dari perasaan kebersamaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah (Smith, 1985).

3) Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Suatu masyarakat dengan penduduknya yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding masyarakat yang heterogen. Jika faktor

homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom (Smith, 1989).

4) Faktor Sejarah

Faktor sejarah ini mengasumsikan, bahwa struktur sejarah pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom. Meskipun sejarah kadang-kadang berlangsung secara terputus-putus dalam kurun waktu yang cukup panjang, tetapi tetap menjadi salah satu faktor yang sering mengikuti kemunculan suatu daerah otonom. Apalagi jika, simbol-simbol sejarah tersebut masih berlangsung di dalam masyarakat, walaupun hanya dalam bentuk tatanan dan upacara-upacara budaya.

b. Dimensi Administrasi/Teknis

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membangun hubungan dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi pelaksana di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan dan pelayanan terhadap

karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis (Mutalib, 1987).

Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk:

- 1) pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit.
- 2) pemerintahan lebih responsive karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani.
- 3) partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka.
- 4) konsultasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan instansi pemerintahan dengan masyarakat.
- 5) pengawasan menjadi lebih efektif karena wilayah pengawasan yang relatif sempit.

c. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Dalam banyak kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relatif tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Daerah yang maju sebagai konsekuensi arus modal dan teknologi, sering menjadi sentral bagi daerah-daerah lain. Sedangkan daerah-daerah lain berkedudukan sebagai periferi bagi daerah maju tersebut.

Hubungan antar wilayah dalam daerah otonom juga akan sangat dipengaruhi oleh pembagian sumber daya dan pengelolaan potensi ekonomi suatu daerah. Wilayah dengan potensi ekonomi yang tinggi, tetapi memiliki kemajuan yang relatif rendah dibanding dengan wilayah lainnya di daerah yang sama akan cenderung melepaskan diri dari daerah induknya. Asumsi pembentukan daerah tersebut adalah, dengan potensi ekonomi yang mereka miliki jika mereka kelola sendiri akan menghasilkan kemajuan yang lebih besar dibanding jika mereka tetap bergabung dengan wilayah lain dalam suatu daerah. Dasar pembentukan ini dapat saja bercampur aduk dengan kepentingan politik kelompok atau perorangan dengan memanfaatkan sentiment masyarakat yang merasa terpinggirkan. Kesenjangan kemajuan antara wilayah dalam suatu daerah akan menjadi dasar terbentuknya daerah otonom. Kesenjangan ini juga dapat menjadi dasar hidupnya berbagai kepentingan politik dengan menggunakan isu kesenjangan kemajuan tersebut. Jika faktor kesenjangan berakumulasi dengan aspek-aspek geopolitis, seperti wilayah, etnisitas dan sejarah lahirlah satu daerah, maka dorongan membentuk daerah otonom akan semakin besar.

2. Pengertian dan Tipe Elite

Kata elite (*elite*) digunakan pada abad ketujuh belas untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas sempurna, yang mempunyai keutamaan khusus, yang kemudian penggunaan kata itu diperluas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-

unit/kesatuan-kesatuan militer kelas satu atau tingkatan bangsawan yang tinggi⁸. Dalam mencermati pengertian elite, Lipset dan Solari, sebagaimana dikutip oleh Schoorl, yang mengemukakan pendapatannya bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian elit ialah posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas⁹.

Dari sebagaimana diungkapkan gambaran di atas, maka di masyarakat diketemukan adanya sejumlah individu yang berperan sebagai elit pada salah satu cabang kehidupan tertentu. Akan tetapi yang bersangkutan, pada waktu yang bersamaan, tidak termasuk dalam jajaran elit pada cabang-cabang kehidupan yang lainnya. Sebagai missal, individu-individu tersebut dapat digolongkan sebagai elit di bidang kehidupan ekonomi karena mereka dapat dinyatakan sebagai pengusaha yang berhasil; akan tetapi dalam waktu yang berbarengan mereka tidak termasuk dalam kelompok elit bidang politik karena aktivitasnya di bidang kehidupan ini dapat dinyatakan relatif jarang dan tidak menonjol.

Sementara di dalam masyarakat, tidak tertutup kemungkinan pula adanya sejumlah individu tertentu yang menjadi elit pada beberapa cabang kehidupan yang

⁸ T.B. Bottomore, 2006. *Elit dalam Masyarakat*. Jakarta, Akbar Tanjung Institute, hal. iii.

⁹ Lipset dan Solari dalam Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana (S2) PLOD, hal. 68.

ada di dalam masyarakat dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena itu, dengan mengikuti premisalan diatas, maka dimungkinkan pula adanya individu yang termasuk dalam kelompok elit di bidang ekonomi; dan pada tenggang waktu yang bersamaan yang bersangkutan termasuk pula dalam kelompok elit di bidang politik. Hal in dikarenakan individu tersebut selain sebagai pengusaha yang berhasil juga mampu memainkan peran dan mempunyai pengaruh yang relatif besar di bidang kehidupan politik.¹⁰

Istilah elit juga menunjuk kepada suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab--efektif melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. Golongan elit yang mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab untuk realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial¹¹.

Secara sederhana, elite diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat misalnya elite pendidikan, elite agama, dan elite organisasi. Namun, dalam perspektif sosiologi, elite itu lebih banyak ditujukan kepada elite politik (*political elite*)¹². Menurut David Jarry dan Julia Jarry, asumsi teori elite yang

¹⁰ *Ibid*, hal. 68-69

¹¹ Suzanne Keller, 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, cet. I. CV. Rajawali, Jakarta. hal. 3

¹² Syarifuddin Jurdi, 2004. *Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. Gadjah Mada University Press. hal. 3

membagi kaum elite dan rakyat jelata merupakan ciri yang tidak dapat terelakkan dalam masyarakat modern yang kompleks dimana pun juga¹³. Sedangkan menurut Harold Laswell, elite adalah segolongan kecil yang memperoleh sebagian besar dari nilai apa saja, elite itu menunjuk pada mereka yang berpengaruh¹⁴.

Dalam perspektif elitis terdapat dua macam pendekatan teoritis yang berlainan dalam menerangkan kelahiran dan keberadaan kelompok elite. Teori pertama, kelompok elite dianggap lahir dari proses yang alami (disebut juga dengan model elitis klasik). Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang memang di karuniai kepandaian, kemampuan dan ketrampilan lebih tinggi dalam mengatasi dan memecahkan berbagai persoalan hidup. Di dalam diri anggota kelompok ini melekat karakteristik individual tertentu yang sangat berbeda dengan orang-orang biasa (massa). Dengan demikian kelompok elite ini lahir bukan karena mereka menempati posisi-posisi strategis dalam masyarakat, tetapi lebih karena mereka memiliki kapasitas personal yang lebih potensial untuk menempati posisi itu. Kelompok pertama ini dipelopori Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1858-1941), Robert Michels, dan C. Wright Mills.

Teori kedua, kelompok elite dianggap lahir dari akibat kompleksitas organisasi sosial, terutama dalam menjawab heterogenitas masalah ekonomi dan politik (dikenal juga dengan model elitis kontempores) yang

¹³ David Jarry dan Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociology* (Glasgow: Harper Collins Publishers, 1991), hal. 188

¹⁴ Sunarlan, "Gerakan Reformasi Politik", Tesis S2 (Yogyakarta: Program Politik Fisipol UGM, 2000).

dipelopori oleh Robert Putnam. Dalam pendekatan teoritis ini, kelompok elite dikonsepsikan sebagai orang-orang yang terpilih menempati posisi-posisi penting dalam organisasi sosial. Mereka lalu memiliki wewenang dan dipercaya menjaga dan mengontrol kegiatan ekonomi dan politik. Karena itu tidak mengherankan apabila sebagian besar dari upaya mencapai tujuan organisasi lalu ditaruh dan dipertaruhkan di pundak mereka.¹⁵

Selain itu, mengenai elit yang berkuasa dinyatakan oleh Harold Laswell merupakan "suatu kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil menempati kedudukan dominasi dalam masyarakat, dalam arti bahwa nilai-nilai (values) yang mereka bentuk (ciptakan, hasilkan) mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan". Nilai-nilai (values) tersebut mungkin dapat berwujud kekuasaan, kekayaan, kehormatan, pengetahuan, dan lain-lainnya. Mereka berhasil memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut dalam jumlah yang banyak, pada gilirannya akan menduduki lapisan atas daripada stratifikasi yang ada di masyarakat yang bersangkutan. Sebaliknya, mereka yang kurang atau bahkan tidak berhasil sama sekali memperoleh dan menguasai nilai-nilai tersebut akan berada pada lapisan bawah dari stratifikasi. Elit, menurut Laswell, adalah individu-individu yang berhasil memiliki sebagian

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Himpunan Teori-teori Politik*. Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 74. Bacaan lebih lengkap tentang teori dan konsep elit yang dijelaskan masing-masing ilmuwan politik tersebut dapat dilihat dalam T.B. Bottomore, 2006. *Op.Cit* dan juga dalam Haryanto, 2005. *Ibid.* hal. 126

terbanyak dari nilai-nilai yang ada karena kecakapan-kecakapan serta sifat-sifat kepribadian mereka¹⁶.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa dalam setiap cabang kehidupan yang ada di masyarakat akan memunculkan sebageaian anggotanya sebagai elit. Dengan demikian di masyarakat akan diketemukan adanya elit dibidang ekonomi, hukum, politik, dan berbagai bidang lainnya seperti bidang olah raga ataupun kesenian. Dengan pernyataan lain, hal tersebut dapat diungkapkan bahwa di setiap bidang kehidupan terdapat sejumlah anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan anggota-anggota masyarakat lainnya, dan mereka menduduki struktur puncak bidang kehidupan tersebut. Merekalah yang disebut elit pada bidang kehidupan masing-masing. Berdasarkan sifat dan karakter elit, individu-individu yang tergabung dalam kelompok elit dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yakni :

- a. elit yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan,
- b. elit liberal, dan
- c. tipe pelawan elit (*counter elite*).¹⁷

Kelompok elit dengan tipe berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan dapat dinyatakan mempunyai sifat cenderung tertutup, dalam arti menolak golongan lain yang bukan elit untuk memasuki kelompoknya. Mereka yang tergabung dalam elit berupaya melakukan kolaborasi untuk mempertahankan keadaan yang tengah berlangsung. Oleh karena itu elit

¹⁶ *Ibid*, hal. 126

¹⁷ *Ibid*, hal. 32-34

tipe ini dapat dinyatakan mempunyai sifat konservatif, di mana sikap dan perilakunya cenderung untuk memelihara dan mempertahankan status quo. Elit dengan tipe ini dapat pula dinyatakan kurang mempunyai daya tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat; yang penting baginya adalah pemenuhan kepentingan golongannya.

Kelompok elit yang bertipe liberal mempunyai sikap dan perilaku yang mengarah pada terciptanya suasana kondusif yang memberi kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anggota masyarakat untuk merubah status sosialnya. Elit dengan tipe ini membuka peluang yang sama bagi anggota masyarakat yang bukan berasal dari kelompok elit untuk bersaing secara sehat untuk dapat menjadi elit. Adanya peluang yang sama dan persaingan yang sehat bagi anggota-anggota masyarakat untuk memasuki lingkungan elit menjadikan perpindahan status sosial masyarakat relatif gampang mengalami perubahan. Elit bertipe liberal mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Kelompok elit dengan tipe pelawan elit (*counter elite*) berorientasi pada khalayak dengan cara menentang segala bentuk kemapanan ataupun dengan cara menentang segala bentuk perubahan. Dengan menentang kemapanan ataupun perubahan, maka mereka yang tergabung dalam kelompok pelawan elit (*counter elite*) mempunyai ciri ekstrim, tidak toleran, anti-intelektualisme, beridentitas superioritas rasial tertentu, dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya. Kelompok ini dapat dipilah menjadi sayap

kiri (*left wing*) yang selalu menuntut perubahan secara radikal dan revolusioner, dan sayap kanan (*right wing*) yang selalu menentang terjadinya perubahan baik sosial, budaya, ekonomi ataupun politik. Namun demikian kelompok ini, baik sayap kiri (*left wing*) ataupun sayap kanan (*right wing*), memperlihatkan diri sebagai kelompok yang membawa aspirasi masyarakat.

3. Pengertian Konfigurasi Elite

Istilah konfigurasi dimaknai sebagai susunan, struktur, komposisi, bentuk; wujud (untuk menggambarkan orang atau benda) yang saling berurutan dan mengalami keterkaitan satu sama lainnya. Gagasan konfigurasi memiliki arti yang sama seperti dalam astronomi: posisi planet korps dalam hubungannya dengan satu sama lain. Dalam studi elit, konfigurasi berarti posisi relatif dan ukuran berbagai kalangan elite (politik, birokrasi, kapitalis, manajerial, budaya, agama, militer, dll) dalam konstelasi kekuasaan. Konfigurasi elit mencerminkan adanya hubungan struktur baik dalam sosial, ekonomi, budaya dan politik yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Konfigurasi elit menandai adanya perbedaan yang signifikan¹⁸.

Pemikiran dikemukakan oleh Suzanne Keller dapat digunakan sebagai landasan penelusuran konfigurasi elit politik. Pemetaan elit bukan pertama kali dilakukan oleh Keller, namun peletakan pembedaan sebagai dasar pemetaan acuan konfigurasi adalah buah pemikiran Keller dengan tidak lupa menganalisa berbagai pemilahan elit yang telah dilakukan terdahulu semisal oleh Saint

¹⁸ Mattei Dogan, 2003. *Elite Configuration At the Apex of Power*. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Hal. 1

Simon, Karl Mannheim, Pareto, Mosca, Laswell, Aron, dan Aristoteles.¹⁹

Meskipun tidak digambarkan suatu konfigurasi elit secara khusus dalam arena politik, Keller mengidentifikasi adanya elit di antara minoritas-minoritas personal yang memiliki posisi strategis sehingga mempunyai nilai lebih dari yang lainnya, elit ini disebutnya sebagai "elit strategis". Kehadiran elit strategis kemudian menjadi pembeda terhadap elit secara umum yang oleh Keller disebut sebagai kelas penguasa.

Menurut Gaetano Mosca bahwa penguasaan minoritas atas mayoritas dilakukan dengan cara terorganisir, yang menempatkan mayoritas tetap berdiri saja di belakang, apalagi kelompok minoritas biasanya terdiri dari individu-individu yang superior. Kalau Pareto menyebutkan kelas politik yang berisikan kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam²⁰.

Munculnya suatu konfigurasi elit dalam masyarakat yang lebih merupakan hasil dari hubungan-hubungan kekuasaan yang terbatas. Dikatakan terbatas karena hanya melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dominan saja dalam dinamika kegiatan ekonomi-politik lokal. Pada gilirannya, keseluruhan proses tersebut telah menggiring golongan elit sadar atau pun tidak, untuk lebih memusatkan pikiran dan tindakannya pada kepentingan di sekitar mereka sendiri.

¹⁹ Suzanne Keller, 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, cet. II. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta. hal. 5-25

²⁰ SP. Varma, 1999. *Teori Politik Modern*. Cet. V, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hal. 204

Dengan demikian, golongan elit tidak memiliki kepedulian yang cukup untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pada umumnya dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya demi mendapatkan *resource*.

Proses politik pada level mana pun pada muaranya adalah pembentukan konfigurasi elite. Di sini, ada pertukaran kepentingan antar kelompok elite yang menentukan bandul politik. Namun, dalam konteks lokal, implikasinya dapat terjadi pada kebuntuan demokrasi. Setidaknya, para elite cenderung hanya memperkuat barisannya. Dengan tujuan meraup keuntungan ekonomi-politik untuk klan politik terbatas. Risikonya, publik tidak mengalami sentuhan-sentuhan yang lebih maju, prospektif dan revolusioner dalam kerangka strategi dan pilihan kebijakan lokal. Situasinya akan bertambah runyam manakala para penguasa yang dihasilkan dari sebuah proses politik akan menganggap diri sebagai 'puncak' strata sosial politik yang harus diikuti semua kata-katanya dan disetujui semua tindakannya. Konfigurasi elite lokal dikendalikan semangat mengutamakan kepentingan diri, kelompok, dan keluarga sendiri. Maka, tidak mengherankan manakala jaringan famili (keluarga) seorang pejabat publik akan menganggap jabatan yang ada menjadi milik keluarganya. Tidak mengherankan orang-orang yang masuk dalam jaringan keluarga dekat seorang kepala daerah merasa seperti pejabat juga²¹.

²¹ Sumber : <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/42929>

Dari penjelasan uraian konfigurasi elit sebagaimana digambarkan tersebut di atas, maka kita dapat memahami bahwa konfigurasi elit pada dasarnya posisi dan/atau susunan dari berbagai kalangan elit baik dari sisi politik, sisi ekonomi, sisi birokrasi, sisi agama, sisi sosial, sisi budaya dan lain-lainnya. Perbedaan posisi elit dari sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimiliki menunjukkan adanya konfigurasi di antara elit, sehingga dengan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimiliki oleh para elit tersebut, maka elit mengalami perbedaan kepentingan. Kepentingan elit yang dimilikinya, selalu beriringan dengan sumberdaya-sumberdaya (*resource*), akan tetapi dengan (*resource*) terbatas elit akan bersentuhan dengan elit lain dalam melakukan pengaruh untuk meyakinkan bahwa apa yang menjadi pilihannya itulah yang terbaik untuk dilaksanakan bagi kepentingan secara bersama dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

a. Pola Konfigurasi Elite

Bahwa di masyarakat mana saja, baik masyarakat yang masih baru tumbuh hingga yang sudah mampu membangun peradaban yang lebih mapan, yang berkembang menjadi masyarakat yang maju dan powerful, didalamnya terdapat dua klas masyarakat yaitu klas yang menguasai dan yang dikuasai. Klas yang pertama, selalu dalam jumlah yang lebih sedikit, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan dari kekuasaan yang dijalankannya. Sementara itu, klas yang kedua, jumlahnya jauh lebih besar, secara

langsung dikuasai dan dikendalikan oleh klas yang pertama²².

Di setiap masyarakat terlekat perbedaan di antara para anggotanya, hanya ragam dan kadar perbedaan yang membedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Di masyarakat yang relatif homogen, perbedaan yang terdapat di antara anggota-anggota masyarakat dapat dinyatakan relatif tidak begitu menyolok dan tidak pula banyak ragamnya. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang relatif homogen biasanya mempunyai jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, dan ragam kehidupan yang digeluti oleh anggota masyarakat juga tidak begitu bervariasi; dan kondisi seperti ini pada gilirannya akan memunculkan hubungan antar anggota masyarakat yang tidak begitu kompleks. Perbedaan yang tidak begitu menyolok dan tidak banyak ragamnya ini dapat ditemukan dalam masyarakat yang bernafaskan 'gemeinschaft' sebagaimana yang dilukiskan oleh Ferdinand Tonnies, atau dalam masyarakat yang digambarkan oleh Emile Durkheim dilekati oleh solidaritas mekanik atau '*mechanical solidarity*'²³.

Apabila masyarakat yang homogen tadi, karena perkembangan jaman seiring dengan perjalanan waktu, mulai meninggalkan sifat homogenitasnya dan berubah menjadi masyarakat yang heterogen; maka perbedaan yang terdapat pada masyarakat tersebut

²² Zainuddin Maliki, 2010. *Sosiologi Politik, Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Cet. I, Gadjah Mada University Press. hal. xi

²³ Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana (S2) PLOD, hal. 69

juga akan mengalami perubahan yang semakin menyolok dan semakin banyak ragamnya. Masyarakat yang heterogen di dalam dirinya mengandung jumlah penduduk yang relatif banyak, semakin bervariasi jenis cabang kehidupan yang digeluti oleh para warganya, dan semakin kompleks hubungan antar sesama anggotanya. Masyarakat seperti itu dilukiskan oleh Ferdinand Tonnies sebagai masyarakat yang mempunyai warna 'gesellschaft', atau masyarakat yang diistilahkan oleh Emile Durkhaeim dilekati oleh solidaritas organik atau '*organic solidarity*'.

Masyarakat yang relatif heterogen mempunyai kecenderungan untuk memiliki elit yang lebih banyak ragamnya. Dapat dinyatakan hampir semua cabang kehidupan mempunyai elitnya masing-masing. Hal ini antara lain dikarenakan sifatnya heterogenitas yang melekat pada masyarakat tersebut pada gilirannya akan memunculkan kebutuhan warga yang sedemikian bervariasi, dan menjadikan hubungan antar anggota masyarakat menjadi semakin kompleks. Dengan semakin banyak ragam kebutuhan dan semakin tinggi kompleksitas hubungan antar warga akan menjadikan setiap cabang kehidupan harus dikelola secara profesional. Kondisi seperti ini yang menjadi penyebab semakin kecil peluang seseorang untuk melakukan peran sebagai elit pada banyak ragam cabang kehidupan sekaligus. Bahkan kondisi tersebut tidak memungkinkan seseorang untuk berperan sebagai elit pada berbagai ragam cabang kehidupan pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dalam masyarakat

yang semakin heterogen, terdapat kecenderungan untuk mempunyai elit yang semakin banyak ragamnya atau elit yang 'tidak tunggal' jenisnya²⁴.

Selo Sumardjan dalam kata pengantarnya menyatakan bahwa selama suatu masyarakat masih kecil dan beragam tunggal (homogeneous) maka pola kepemimpinannya juga cenderung berbentuk tunggal dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. Akan tetapi apabila masyarakat itu bertambah jumlah anggotanya, lagi pula apabila terjadi diversifikasi dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, maka pola kepemimpinan yang beragam tunggal itu akan sukar sekali dilestarikan. Apabila struktur masyarakat menjadi beranekaragam (heterogeneous) maka dengan sendirinya pola kepemimpinannya menjadi beraneka ragam pula. Di tiap-tiap bidang kehidupan masyarakat yang penting akan timbul suatu golongan dengan suatu hierarki tersendiri di mana ada suatu elit atau golongan kecil memegang peranan yang paling berpengaruh di bidangnya²⁵.

Seseorang atau sekelompok orang mempunyai keunggulan tertentu, dan kemudian dengan keunggulan tersebut mampu berperan menonjol dan mempunyai pengaruh dalam cabang kehidupan ekonomi dapat dinyatakan sebagai elit di bidang ekonomi; sementara itu seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan dan kemudian yang bersangkutan mampu memainkan peran menonjol dan mempunyai pengaruh besar di bidang

²⁴ *Ibid*, hal. 71

²⁵ *Ibid*, hal. 71-72

politik dapat dinyatakan sebagai elit di bidang politik; demikian seterusnya di bidang-bidang kehidupan lainnya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya seseorang atau sekelompok orang dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya mampu memainkan peran yang menonjol dan berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan dimungkinkan yang bersangkutan selain menjadi elit bidang ekonomi juga menjadi elit di bidang politik.

Menurut Laswell mengemukakan bahwa kaum elit adalah mereka yang memperoleh paling banyak daripada apa yang diperoleh, dan tiga hal yang paling berharga untuk didapatkan yaitu kehormatan, pendapatan dan keamanan. Suatu elit tunggal dapat memonopoli atau memborong ketiga tipa imbalan atau beberapa elit yang berkoeksistensi (hidup berdampingan) berbagai antara mereka²⁶.

Basis kekuasaan elit adalah modal dasar dan keunggulan yang menjadikan elit memiliki kekuasaan, termasuk di dalamnya posisi elit, keunggulan semisal ekonomi, politik, sosial, kultural, agama, militer, keahlian dan lainnya, dan kekuasaan atau pengaruh yang mampu menciptakan kepatuhan terhadap orang atau kelompok yang lain dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah obyek kepatuhan.

1) **Elit yang Memerintah (*Governing Elite*) dan Elit yang Tidak Memerintah (*Non-Governing Elite*)**

Berkaitan dengan adanya anggapan yang menyatakan bahwa di setiap masyarakat pasti

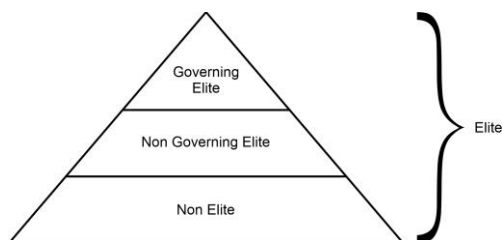
²⁶ *Ibid*, hal. 21

diperlukan kehadiran pemimpin, maka individu atau sekelompok individu yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu pada umumnya akan tampil sebagai pemimpin di masyarakatnya. Dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka akan mengarahkan individu-individu yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kaitannya dengan hal tersebut, Pareto ataupun Mosca menyatakan pendapatnya bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional ataupun yang modern, pasti ditemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Dinyatakan lebih lanjut bahwa sekelompok kecil individu tadi atau yang merupakan lapisan elit di masyarakat dapat dipilahkan menjadi elit yang memerintah atau 'governing elite' dan kelompok elit yang tidak sedang memerintah atau 'non governing elite'. Dijelaskan bahwa mereka yang termasuk dalam kelompok elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan polititis, dan mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung pembuatan kebijaksanaan²⁷.

Pendapat tersebut di atas apabila dipaparkan dalam bentuk gambar menunjukkan sebuah piramida yang terbagi menjadi beberapa lapis.

²⁷ *Ibid*, hal. 73-74

Piramida tersebut melukiskan masyarakat yang terbagi menjadi 2 (dua) lapis, yakni anggota masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit yang jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan lapis lainnya yang terdiri dari anggota masyarakat pada umumnya yang tidak termasuk dalam kelompok elit (non elite). Sementara itu mereka yang termasuk dalam kelompok elite masih dipilah lagi menjadi 2 (dua), yakni mereka yang termasuk dalam kelompok elite yang sedang memerintah (*governing elite*) yang jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam kelompok elit namun tidak sedang memerintah (*non governing elite*). Gambar berikut ini dapat memperjelas hal tersebut.



Sumber: Mark N. Hagopian (1978:224)

Melengkapi uraian sebagaimana dikemukakan Pareto ataupun Mosca di atas, Guido Dorso menyatakan bahwa di masyarakat terdapat suatu dikotomi, yakni terdapat sekelompok anggota masyarakat yang melakukan peran sebagai kelas yang memerintah dan sekelompok anggota

masyarakat yang lainnya dalam jumlah besar yang berperan sebagai kelas yang diperintah. Kelas yang sedang memerintah, atau yang disebutnya dengan istilah 'the ruling class' dinyatakan sebagai kelompok yang mempunyai power atau kekuasaan. Lapis masyarakat yang memerintah atau 'the ruling class' di dalamnya terdapat kelompok yang tergolong dalam 'the political class' yang berada pada puncak piramida²⁸.

Menurut pendapat Gaetano Mosca, dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol. Pertama, bahwa kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah, yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan.²⁹

Asumsi yang mendasar model ini, setiap masyarakat tidak pernah terdapat distribusi kekuasaan yang merata. Mereka yang memiliki sumber kekuasaan yang memiliki kekuasaan politik, dan jumlah yang memiliki kekuasaan politik sedikit sekali, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam masyarakat-negara. Asumsi

²⁸ *Ibid*, hal. 75-76

²⁹ Gaetano Mosca, 1939. *The Ruling Class*. New York: McGraw-Hill Book. Hlm, 50 dalam Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta. hal. 75

kedua, jumlah orang yang memerintah suatu masyarakat selalu lebih sedikit daripada yang diperintah. Itu sebabnya, mengapa elit politik dirumuskan sebagai sekelompok kecil orang/individu-individu yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Asumsi ketiga, di antara elit politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai, yang berarti mempertahankan status sebagai elit politik. Elit politik merupakan kelompok kecil dari warganegara yang berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara operasional para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi kehidupan dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok elit politik.

Elit yang memerintah dapat dikatakan sebagai elit yang berkuasa/politik. Elit politik adalah mereka yang memiliki jabatan politik dalam sistem politik. Jabatan politik adalah status tertinggi yang diperoleh setiap warga Negara. Dalam system politik apapun, setiap struktur politik atau struktur kekuasaan selalu ditempati oleh elit yang disebut elit politik atau elit penguasa. Laswel menyatakan bahwa elit yang paling unggul kedudukannya ialah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik; sebab di lapangan politik keputusan-keputusannya disertai dengan sanksi-sanksi yang paling kuat, kekuasaan politik

dipandang sebagai nilai yang mempunyai daya 'perekat' yang dapat mengakibatkan nilai-nilai yang lain 'mengikutinya'³⁰. Elit politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan, elit ini terdiri dari; Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Anggota DPR/DPRD dan Ketua-ketua Partai.

Sedangkan elit yang tidak memerintah yaitu individu-individu atau sekelompok elit yang tidak mempunyai power atau kekuasaan untuk memerintah atau tidak menduduki jabatan-jabatan politis tetapi mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi secara langsung pembuatan keputusan-keputusan/kebijaksanaan yang dilakukan oleh elit yang memerintah, elit ini terdiri dari; elit ekonomi, elit kultur, elit agama, elit pendidikan, dan sebagainya.

2) Pola Elit yang Bekerja sama

Kelompok elit pada prinsipnya terdiri dari berbagai status; politik, birokrasi, ekonomi, sosial, agama, dan lainnya. Perbedaan status elit tidak menjadikan adanya kesenjangan dimasing-masing elit, akan tetapi kesamaan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan/diharapkan menimbulkan kerja sama yang baik di antara elit.

³⁰ *Ibid*, hal. 127-128

Relasi elit dari berbagai status sosial dalam bekerja sama selalu terjalin satu dengan lainnya demi mencapai tujuan. Relasi antar elit bisa terjadi secara horizontal dan vertikal.

Relasi secara horizontal, terjadi manakala elit memiliki status sosial yang setara/ sederajat; elit ekonomi dengan elit ekonomi lainnya, elit politik dengan elit politik, elit birokrasi dengan elit birokrasi, elit agama dengan elit agama, dan sebagainya, yang mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama pula di antara elit-elit tersebut. Sehingga masing-masing elit mempunyai relasi keterkaitan satu dengan lainnya untuk bekerja sama demi mencapai kepentingan-kepentingannya.

Sedangkan, relasi secara vertikal yaitu relasi yang dibangun antara elit setara/ sederajat dengan elit yang lebih tinggi status sosialnya/ penguasa dan mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Sebagai misal; elit ekonomi memiliki kepentingan untuk mendapatkan proyek dari pemerintah dan/ atau memuluskan kepentingan pribadinya dalam dunia usaha (bisnis), maka upaya yang harus dilakukan oleh elit ekonomi yaitu melakukan relasi kerja sama dengan elit politik yang lebih tinggi/ mempunyai kekuasaan sehingga rencana yang diinginkan elit ekonomi dapat terwujud sesuai yang diharapkan dan begitu juga sebaliknya, elit politik punya kepentingan mendapatkan sumberdaya (*resource*) yang lebih tinggi tetapi tidak mempunyai modal (*financial*)

untuk mencapai tujuan politik yang diinginkan tersebut, sehingga harus melakukan kerja sama dengan elit ekonomi; meminjam modal sebagai bentuk kerja sama di antara kedua elit.

Menurut Robert D. Putnam dan kesepakatan para 'elite theorists' menyatakan bahwa secara internal, elit bersifat homogen, bersatu, dan memiliki kesadaran kelompok. Elit itu bukan merupakan kumpulan individu-individu yang saling terpisah, atau sekedar merupakan penjumlahan orang-orang saja. Tetapi sebaliknya, individu-individu yang ada dalam kelompok elit itu saling mengenal dengan baik, memiliki latar belakang yang mirip, dan memiliki nilai-nilai, kesetiaan, dan kepentingan yang sama. Untuk ini ada yang mengatakan kelompok elit itu memiliki "Tiga K", yaitu kesadaran, keutuhan, dan kebulatan tujuan kelompok³¹.

Selanjutnya menurut C. Wright Mills, individu-individu yang termasuk dalam kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, homogen dan erat berhubungan satu dengan lainnya. Mereka yang menduduki posisi puncak dalam bidang ekonomi, militer dan politik berasal dari latar belakang sosial dan pandangan hidup yang relatif serupa. Pandangan hidup mereka banyak menunjukkan persamaan karena kebanyakan di antara mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang sama, mempunyai agama yang dipeluknya juga sama, dan dengan

³¹ *Ibid*, hal. 30-31

demikian pula mereka sering bertemu dalam perkumpulan-perkumpulan yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok sosial yang sama³².

Berkaitan dengan uraian di atas yang didasarkan pada pendapat Mills, persoalan yang muncul adalah apakah mereka yang tergabung dalam dalam kelompok elit-baik elit ekonomi, militer ataupun politik--merupakan satu kumpulan atau kesatuan yang utuh atau tidak. Dengan perkataan lain, persoalan tersebut dapat diungkapkan dengan pertanyaan apakah di antara para elit mempunyai kepentingan yang relatif sama atau justru sebaliknya terlekat kepentingan yang berlainan. Menurut pendapat Mills, kepentingan-kepentingan yang ada pada diri elit terumuskan sedemikian rupa sehingga terdapat hal-hal yang dapat dipertemukan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Walaupun dalam hal ini Mills tidak menyatakan bahwa ada kesepakatan yang dibuat secara sadar di antara elit ekonomi, militer dan politik tentang adanya kepentingan-kepentingan yang relatif sama di antara mereka³³. Karl Mannheim juga mengemukakan bahwa para elit terdiri dari suatu sistem bagian-bagian yang saling tergantung, masing-masing berpartisipasi dalam pelebagaan -- dan di sini ia memasuki istilah lama dengan makna baru. "Dengan

³² C. Wright Mills dalam Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana (S2) PLOD, hal. 130

³³ *Ibid*, hal. 130-131

perlembagaan, kita akan mudah mengerti semua golongan dan pemimpin yang memainkan peranan aktif dalam organisasi masyarakat". Mereka dapat saja merupakan pengusaha-pengusaha yang menunjuk dirinya sendiri, atau hakim-hakim yang dipilih dan lainnya³⁴.

Sifat saling tergantung satu terhadap lainnya yang melekat pada diri elit ekonomi, militer ataupun politik dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa faktor struktur sosial tertentu. Struktur sosial yang penting adalah bentuk dan derajat desentralisasi institusi ekonomi, militer dan politik yang ternyata sedemikian besar. Dengan bentuk susunan institusional yang besar mengandung arti bahwa para elit dalam proses pembuatan keputusan-keputusan harus saling mempertimbangkan kepentingan satu dengan lainnya. Tingkat sentralisasi yang tinggi mengandung arti bahwa keputusan dan tindakan para elit pada masing-masing institusi akan menghasilkan hubungan yang luas, baik di dalam institusi itu sendiri maupun di masyarakat luas. Atau dengan pernyataan lain dapat dinyatakan bahwa para elit dari ketiga institusi tersebut melakukan tindakan yang sifatnya saling mengisi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan

³⁴ Karl Mannheim dalam Suzanne Keller, 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, cet. I. CV. Rajawali, Jakarta, hal. 17-18

keputusan-keputusan yang berlaku dan mengikat seluruh anggota masyarakat³⁵.

Selain faktor struktur sosial yang menjadi penyebab keterkaitan/kerja sama di antara para elit, maka faktor psikologi sosial juga menyumbang terjadinya keterkaitan tadi. Faktor psikologi sosial tersebut muncul dari latar belakang para elit dan pengalaman sosialnya yang relatif sama³⁶. Mereka yang berperan sebagai elit berasal dari latar belakang sosial dan pandangan hidup yang serupa. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan, wilayah (geografis), etnis dan agama yang sama, dan mereka sering pula bergaul dalam berbagai kelompok sosial yang sama. Dengan demikian, faktor psikologi sosial, maka elit dari berbagai status sosial dapat bersatu dan bekerja sama antara elit satu dengan lainnya.

3) Pola Elit yang Berseberangan

Watak atau sifat yang melekat pada diri elit di suatu masyarakat belum tentu sama dengan watak atau sifat elit yang ada di masyarakat lainnya. Hal tersebut paling tidak ditentukan oleh tipe dari masyarakat di mana elit berada, dan juga ditentukan oleh sifat budayanya³⁷. Kondisi lingkungan yang ada di dalam suatu masyarakat dan ideologi yang berbeda, yang dianut elit dapat mempengaruhi pandangan elit terhadap relasi

³⁵ *Ibid*, hal. 131-132

³⁶ *Ibid*, hal. 132

³⁷ *Ibid*, hal. 99

kerja sama. Sikap dan tindakan elit dalam upaya untuk mencapai tujuan dan kepentingan-kepentingannya dapat mempengaruhi hubungan kerja sama di antara elit.

Dengan demikian, kesamaan tujuan dan kepentingan di antara elit tidak serta merta terjalannya kerja sama yang baik di antara para elit, tetapi perbedaan kepentingan masing-masing elit akan dapat menimbulkan persaingan elit sehingga di antara elit saling berseberangan diantara satu dengan lainnya.

Menurut Laswell ada kemungkinan terjadi pergeseran di antara pelbagai elit. Elit yang memiliki nilai-nilai tertentu ada kemungkinan digeser posisi pengaruhnya oleh elit yang memiliki nilai-nilai lainnya. Untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok elit yang mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat masyarakat, elit dituntut memiliki kecakapan-kecakapan tertentu. Kecakapan-kecakapan yang perlu dimiliki oleh elit dapat berupa kecakapan yang berwujud mulai dari kemampuan untuk menyakinkan dan memanipulasi, sampai dengan kemampuan untuk melakukan paksaan baik dengan kekerasan ataupun tidak dengan kekerasan. Kesemuanya itu untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok yang lebih unggul dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya³⁸.

³⁸ *Ibid*, hal. 128

Jadi, elit yang tidak memiliki kecakapan-kecakapan tertentu sebagaimana disebut Laswell. Kemungkinan elit tidak mampu mempengaruhi -- meyakinkan masyarakat dan posisinya dapat digeser oleh elit lainnya yang memiliki kecakapan dan nilai-nilai lainnya, sehingga elit yang tidak memiliki kecakapan dan nilai-nilai tersebut berseberangan dengan elit lainnya. Faktor struktur sosial dan psikologi sosial tidak menentukan terjalannya keterkaitan/kerja sama yang terlalu lama di antara para elit. Akan tetapi persaingan kepentingan untuk mendapatkan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) dapat menimbulkan perbedaan di antara elit sehingga masing-masing elit lebih memilih berseberangan dengan elit-elit lainnya yang mempunyai perbedaan dan persaingan kepentingan dalam memperebutkan *resource* yang sama.

Tujuan politiklah yang memaksa dan mendorong individu untuk membentuk kelompok-kelompok serta mengaktualisasikan dirinya di dalam kelompok tersebut. Kepentingan merupakan kekuatan pendorong yang utama dan setiap tindakan didasarkan atas kepemilikan kepentingan. Konfigurasi kekuasaan pada dasarnya adalah konfigurasi kepentingan-kepentingan yang berjuang dan berlomba, yang terorganisasikan dalam kelompok³⁹.

Kepentingan politik yang berbeda, yang dimiliki oleh kelompok elit menandakan setiap elit

³⁹ *Ibid*, hal. 199

mempunyai kepentingan dan tujuan politik yang tidak sejalan. Perbedaan kepentingan yang dimiliki kelompok elit, secara sadar menimbulkan persaingan dan persinggungan di antara elit sehingga masing-masing elit berusaha untuk mendapatkan tujuan-tujuannya yang diharapkan. Perbedaan kepentingan elit untuk mendapatkan pengaruh, dukungan dari masyarakat dan sumberdaya-sumberdaya (*resource*); politik, sosial, dan ekonomi merupakan sesuatu yang sering terjadi di kalangan para elit. Setiap elit memiliki sumberdaya masing-masing dan berupaya menggunakannya demi kepentingan politiknya. Menurut Robert Dahl mengenai “pengaruh” dikatakan bahwa ada beberapa faktor terkait dengan perbedaan-perbedaan pengaruh, antara lain: Perbedaan-perbedaan dalam pembagian sumber daya politik, keanekaragaman atau kedayagunaan yang menjadi sarana orang-orang menggunakan sumber daya politik mereka, keanekaragaman luas sumber daya yang digunakan orang-orang untuk tujuan-tujuan politik mereka⁴⁰.

Dengan demikian, elit tidak selamanya berpola kerja sama/keterkaitan; kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, homogen dan erat berhubungan satu dengan lainnya, adanya faktor struktur sosial dan psikologi sosial sehingga di antara elit saling

⁴⁰ Robert Dahl, 1994. *Analisis Politik Modern*, terjemahan, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 46

keterkaitan/kerja sama. Tetapi, elit juga terkadang berpola saling berseberangan antara elit satu dengan lainnya. Faktor utama terjadinya pola elit saling berseberangan yaitu karena perbedaan tujuan/kepentingan dan persaingan kepentingan untuk mendapatkan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang jumlahnya terbatas.

Bagian

2

SELAYANG PADANG PULAU OBI

A. Letak Geografis

Secara geografis Obi merupakan wilayah kepulauan yang terletak dibagian selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Pulau Obi terdiri dari beberapa pulau besar (Obi Mayor) dan pulau kecil (Obi Minor), yang dikelilingi lautan yang cukup luas dari segala sudut kewilayahan. Sehingga untuk dapat menjangkau pulau-pulau/daerah satu dengan lainnya, alat transportasi yang sering digunakan yaitu alat transportasi laut. Luas wilayah Kepulauan Obi mencapai 3.111 km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Obi/Bacan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kepulauan Sula

Kondisi geografis Obi sebagai daerah kepulauan, maka akses pelayanan dalam segala bidang kehidupan; ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pembangunan, politik, dsb, yang dirasakan selama ini masih jauh dari harapan masyarakat Obi. Rentang kendali pulau Obi kepusat pemerintahan/ibu kota kabupaten induk menjadi faktor utama, sehingga pelayanan publik di pulau Obi belum

maksimal dijalankan oleh pemerintah daerah. Sektor pelayanan publik lebih bertumpuk pada daerah pulau Labuha-Bacan (Ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan) dan daerah sekitarnya, yang rentang kendalanya sangat pendek untuk menjangkau kepusat pemerintahan/ ibu kota kabupaten.

B. Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan

Secara administrasi, pulau Obi sejak tahun 2003 termasuk ke dalam administrasi pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dengan ibu kota kabupaten di Labuha-Bacan. Pulau Obi sendiri terbagi dalam 5 (lima) kecamatan:

1. Kecamatan Obi
2. Kecamatan Obi Barat
3. Kecamatan Obi Utara
4. Kecamatan Obi Selatan
5. Kecamatan Obi Timur

Adapun jumlah penduduk sebanyak 52.321 jiwa dengan masing-masing kecamatan sebagai berikut ; Kecamatan Obi 16.045 jiwa, Kecamatan Obi Barat 6,905 jiwa, Kecamatan Obi Utara 10.396 jiwa, Kecamatan Selatan 13.738 jiwa dan Kecamatan Obi Timur 5.237 jiwa.

C. Sumber Daya Alam

Setiap daerah memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya untuk mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam suatu daerah, akan membentuk suatu hubungan yang berupa jaringan kerja yang saling tergantung satu sama lain. Potensi

sumber daya alam hanya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan, kualitas dengan menggunakan teknologi, sarana maupun prasarana yang tersedia dalam suatu institusi yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Wilayah kepulauan Obi secara geografis merupakan laboratorium alam geologi. Beberapa potensi sumberdaya mineral atau bahan galian tambang dapat ditemukan di hampir seluruh daerah kepulauan Obi, seperti tembaga, emas, nikel, batu bara, magnesium, pasir besi, mangan, batu permata, kromit, pasir kuarsa, batu gamping, batu apung, migas, potensi panas bumi dan sumberdaya air. Sektor perikanan, perkebunan dan pariwisata menjadi bagian dari sumberdaya alam yang dimiliki pulau Obi.

Bahan-bahan galian tambang tersebut di atas dan sektor lainnya seperti perikanan, perkebunan serta pariwisata memiliki nilai strategis yang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga secara signifikan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Obi sendiri.

D. Transportasi Kepulauan Obi

Transportasi merupakan alat (*tools*) yang digunakan untuk menghubungkan antar berbagai daerah. Sebagai daerah kepulauan, maka transportasi laut dan darat sangat penting untuk digunakan. Sistem sarana transportasi di Kepulauan Obi untuk bisa menjangkau dari suatu daerah/kawasan ke daerah lain dibagi menjadi 2 (dua) transportasi yaitu laut dan darat:

1. Sistem Transportasi Laut

Obi yang mempunyai geografis wilayah kepulauan sehingga transportasi laut sangat dibutuhkan. Ada pelabuhan Jikotamo sebagai pusat transportasi laut di wilayah Kepulauan Obi. Terdapat kapal penumpang dan speed boat sebagai sarana untuk penyeberangan antar pulau. Untuk menuju kepulauan Obi hanya dapat ditempuh dengan sarana transportasi laut ke kota Laiwui. Perjalanan dari Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan ke pulau Obi ditempuh dengan menggunakan kendaraan kapal laut sekitar 7 jam dan 3,5 jam dengan menggunakan speed boat. Selanjutnya dengan kapal laut dari Labuha ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan ke Ternate dengan jarak waktu tempuh 8 jam.

Gambar 1
Alat Transportasi Laut



Kapal Penumpang



Speed Boat

2. Sistem Transportasi Darat

Sarana dan prasarana transportasi darat yang menghubungkan dari desa ke desa maupun antar kecamatan sudah ada dan dalam kondisi baik. Terminal penumpang umum terdapat di Jikotamo dengan sejumlah armada angkutan darat yang siap melayani penumpang. Status jalan di wilayah pulau Obi adalah jalan provinsi dan kabupaten, jalan desa dengan kualitas jalan adalah

jalan aspal, batu dan tanah. Di Jikotamo terdapat penyeberangan Kapal Very yang menghubungkan pulau Obi, Bacan dan pulau Halmahera. Sarana transportasi dliayani oleh angkutan umum antara desa berupa mikro bus ke desa Baru, Sambiki dan Anggai, sedangkan untuk angkutan dalam kota hanya tersedia bus dan ojek.

E. Penerimaan Daerah Kepulauan Obi

Cerminan suatu kemampuan daerah dalam hal financial digambarkan dengan besarnya penerimaan daerah terutama berupa Pendapatan Asli Daerah. Nilai penerimaan Kepulauan Obi dan Kabupaten Halmahera Selatan beserta daerah lain yang ada di Provinsi Maluku Utara dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penerimaan Daerah Tahun 2007

No	Kabupaten / Kota	Penerimaan Daerah Sendiri (Miliaran Rp)
1	Halmahera Tengah	12.432,10
2	Halmahera Barat	22.233,30
3	Kepulauan Sula	29.432,20
4	Halmahera Utara	35.703,48
5	Halmahera Timut	16.605,40
6	Kota Ternate	31.481,00
7	Kota Tidore Kepulauan	9.563,00
8	Halmahera Selatan	36.923,00
9	Pulau Obi	18.235,00
Total		212.608,48

Sumber : Hasil Penelitian Awal Pembentukan Kab. Kepulauan Obi, 2009

Dari uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa pulau Obi (18.235,00) menempati urutan 6 (enam) penerimaan daerah terbesar di dibandingkan dengan Kabupaten/kota yang

sudah dimekarkan yaitu Kota Tidore Kepulauan (9.563,00), Kabupaten Halmahera Tengah (12.432,10), dan Kabupaten Halmahera Timur (16.605,40).

Sedangkan nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Obi ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan rata-rata mencapai 45 % per tahunnya. Pulau Obi bagian dari wilayah yang jumlah kontribusinya ke Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Halmahera Selatan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Halmahera Selatan

Nama Tahun	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Total PAD Kabupaten Halmahera Selatan	Keterangan
	Halmahera Selatan (- Kepulauan Obi)	Kepulauan Obi		
2008	23.463.000.000	19.197.000.000	42.660.000.000	Kontribusi PAD Kepulauan Obi mencapai 45 %
2009	10.912.550.000	8.928.450.000	19.841.000.000	
2010	6.454.250.000	5.280.750.000	11.735.000.000	

Sumber : Halmahera Selatan dalam Angka, BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan, 2011

Dari uraian tabel di atas, menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pulau Obi per tahunnya lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Padahal, untuk wilayah kepulauan Obi hanya mencapai 5 (lima) kecamatan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan

kecamatan lain (25 Kecamatan) yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

F. Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya

Keinginan untuk pembentukan suatu daerah otonom merupakan cerminan dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara yang perlu diakomodasikan secara proporsional. Keinginan tersebut muncul karena faktor latar belakang sejarah, faktor sosial ekonomi dan faktor sosial budaya. Kondisi geografis dan demografis secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pembentukan karakteristik sosial ekonomi masyarakat Obi sebagai wilayah kepulauan. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Obi sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan dan petani. Sedangkan yang lainnya bermata pencaharian sebagai pedagang, pekerja tambang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI dan pekerja tidak tetap.

Faktor sosial budaya, pembentukan dari suatu daerah otonom baru sering didasari oleh alasan bahwa golongan masyarakat tertentu atau nilai-nilai budayanya kurang terakomodasikan dalam sistem pemerintahan yang ada. Dengan keberadaan daerah otonom yang baru kemudian diharapkan dapat lebih mengakomodasikan nilai-nilai budaya setempat yang bersifat khas dalam berbagai aspek.

Dalam kehidupan sosial umat beragama dan antar umat beragama senantiasa berjalan dengan baik, dimana telah tercipta rasa toleransi yang tinggi antara sesama umat beragama yang dibuktikan dengan silaturahmi dan saling mengunjungi pada saat acara keagamaan. Sarana peribadatan cukup tersedia dan didominasi oleh bangunan

Masjid dan Gereja yang tersebar hampir di semua desa pada wilayah Kepulauan Obi, hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduk beragama Islam dan Nasrani.

Tabel 3
Kondisi Agama dalam Wilayah Kepulauan Obi

Nama Kecamatan	Agama			Keterangan
	Islam (%)	Kristen (%)	Kong Hu Cu (%)	
Obi Selatan	56	44	-	Agama Islam 67,3% Agama Kristen 32,4% Kong Hu Cu 0,3%
Obi Timur	37	63	-	
Obi Barat	74	26	-	
Obi Utara	96	4	-	
Obi	73,5	25	1,5	

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan 2010

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa di wilayah Kepulauan Obi mayoritas penduduknya memeluk agama Islam (67,3 %), memeluk agama Kristen (32,4 %) dan agama Kong Hu Cu hanya (0,3 %).

Sedangkan, etnis yang berada di wilayah kepulauan Obi terdiri dari beberapa etnis atau multi enis. Etnis dalam wilayah pulau Obi didominasi oleh etnis Buton, Tobelo, dan etnis campuran lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4
Kondisi Etnis Dalam Wilayah Kepulauan Obi

Nama Kecamatan	Etnisitas			Keterangan
	Buton (%)	Tobelo (%)	Campuran (%)	
Obi Selatan	32	61	7	Buton 62,2%, Togale 33,4% dan Campuran 5% Etnis campuran : Kei, Bugis, Tidore, Makian, Tionghoa, Sanana, dll
Obi Timur	30	70	-	
Obi Barat	95	-	5	
Obi Utara	78	22	-	
Obi	76	14	10	

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan 2010

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa penduduk Kepulauan Obi mayoritas berasal dari etnis Buton (62,2 %), posisi kedua penduduk berasal dari etnis Tobelo (33,4 %), dan selain kedua etnis tersebut ada juga etnis campuran (5 %) yaitu Kei, Bugis, Tidore, Makian, Tionghoa, Sanana, dll.

G. Kehidupan Sosial Politik

Aspek sosial politik dari keinginan untuk membentuk suatu daerah otonom dapat dilihat dari dinamika sosial politik yang terjadi di daerah. Hal ini terutama terkait dengan keinginan masyarakat untuk memilih kewenangan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, agar pemerintah lebih demokratis, lebih bebas dan lebih mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat.

1. Partisipasi dalam Politik

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan dan di wilayah Kepulauan Obi yang akan dimekarkan memiliki perhatian yang cukup mengembirakan, ini terlihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 5
Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu Terhadap Penduduk
Yang Mempunyai Hak Pilih

No	Uraian	Jumlah Penduduk yang punya hak pilih	Jumlah Penduduk yang ikut pilih	Rasio (x)
1	Rasio di Wilayah Kepulauan Obi	27,765	24,678	0,889
2	Rasio Kabupaten Halmahera Selatan	110,489	98,805	0,894

Sumber : KPUD Kabupaten Halmahera Selatan, 2009

Dari tabel tersebut di atas, rasio masyarakat yang menggunakan hak pilih untuk daerah Kepulauan Obi adalah sebesar 0,889, sedangkan wilayah Kabupaten Induk Halmahera Selatan adalah sebesar 0,894. Maka tingkat partisipasi politik antara wilayah Kepulauan Obi dan Kabupaten Induk Halmahera Selatan secara nyata seimbang.

2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Kehadiran organisasi kemasyarakatan mencerminkan banyaknya saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengespresikan kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, indikator tersebut juga mengidentifikasi tingkat kesadaran politik masyarakat daerah untuk turut serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah. Organisasi kemasyarakatan bagian dari interest group yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi untuk mengawal dan memperjuangkan kepentingannya dan juga kepentingan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan lapangan ternyata kegiatan kepemudaan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah sangat positif dalam menunjang kegiatan sosial masyarakat. Berbagai organisasi-organisasi kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan bisa melakukan advokasi terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan sudah berkembang dan cukup dinamis untuk menyalurkan hak-hak aspirasinya secara benar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kepulauan Obi

No	Uraian	Jumlah	Rata-Rata
1	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Wilayah Kepulauan Obi	47	9,40
2	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Induk Halmahera Selatan	164	6,56

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Selatan, Tahun 2009

H. Rentang Kendali

Keberadaan suatu daerah otonom, prinsipnya harus mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemberian layanan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom. Dalam hal ini pembentukan suatu daerah otonom

seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara luas daerah dan jumlah penduduknya.

Terlalu banyaknya jumlah penduduk dalam wilayah yang sempit dapat mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial sebagai akibat kurangnya daya dukung lingkungan. Demikian pula sebaliknya, terlalu banyaknya penduduk dapat berakibat pada ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada penduduknya. Sedangkan terlalu sedikitnya jumlah penduduk dibandingkan dengan luas daerah akan mengakibatkan pemberian layanan akan membutuhkan biaya yang tinggi.

Jumlah kabupaten, kecamatan/desa dan jarak kecamatan, kabupaten serta desa kepusat pemerintah merupakan salah satu tolak ukur yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan daerah otonom baru. Terutama terkait dengan rentang kendali yang akan menentukan akses masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan pemerintah daerah. Pembentukan daerah otonom baru seharusnya dapat memperpendek jarak antara pusat pelayanan dengan wilayah-wilayah jangkauannya, yang dengan demikian akan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Demikian pula, pembentukan daerah seharusnya dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan pemerintah daerah.

Bila di hitung secara rata-rata jarak seluruh kecamatan kepusat pemerintahan Ibu Kota Kab. Halmahera Selatan, dengan asumsi sebanyak 5 kecamatan yang ada di wilayah Kepulauan Obi yaitu sebesar 104.20 km. Sedangkan untuk Kabupaten Induk diperoleh rata-rata 57 km. Dari gambaran

ini terlihat bahwa rentang kendali di wilayah Kepulauan Obi masih lebih jauh dibandingkan dengan Kabupaten Induk, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Rata-rata Jarak Kecamatan Kepusat Pemerintahan Induk

No	Nama Kecamatan	Jarak (km)	Keterangan
1	Obi	93	Jumlah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu 30 Kecamatan
2	Obi Selatan	145	
3	Obi Utara	83	
4	Obi Barat	75	
5	Obi Timur	125	
Rata-rata Jarak Kecamatan		104.20	Jarak kecamatan terjauh di Kepulauan Obi yaitu Kecamatan Obi Selatan mencapai 145 km Jarak kecamatan terjauh di Kabupaten Induk yaitu Kecamatan Gane Timur mencapai 143km
1	Bacan	0	
2	Bacan Selatan	1	
3	Bacan Timur	16	
4	Bacan Barat	36	
5	Bacan Barat Utara	45	
6	Bacan Timur Selatan	30	
7	Bacan Timur Tengah	31	
8	Botang Lomang	3	
9	Mandioli Utara	12	
10	Mandioli Selatan	16	
11	Kasiruta Barat	17	
12	Kasiruta Timur	36	
13	Gane Barat	57	
14	Gane Barat Utara	58	
15	Gane Barat Selatan	65	
16	Kepulauan Jorongan	75	
17	Gane Timur	143	
18	Gane Timur Tengah	120	
19	Gane Timur Selatan	102	
20	Kayoa	85	
21	Kayoa Barat	46	
22	Kayoa Selatan	87	

23	Kayoa Utara	95	
24	Makian	126	
25	Makian Barat	123	
Rata-rata Jarak Kecamatan di Kab. Induk		57	

Sumber : Bappeda dalam Monografi Kab. Halmahera Selatan, 2006

Dari tabel 7 tersebut di atas, apabila dilakukan analisa lebih mendalam bahwa jarak terjauh di wilayah Kepulauan Obi (sebelum pemekaran) ke Kabupaten Induk Halmahera Selatan adalah 145 km ke kecamatan Obi Selatan. Sedangkan untuk kecamatan di Kabupaten Induk jarak terjauh adalah 143 km ke kecamatan Gane Timur. Kecamatan Obi Selatan merupakan kecamatan terjauh ke Ibu kota Kabupaten diantara 4 (empat) kecamatan lain di wilayah Kepulauan Obi. Apabila Kepulauan Obi dimekarkan menjadi kabupaten baru, maka jarak terjauh hanya mencapai 74,90 km dari Ibu kota Kabupaten (Kecamatan Obi/ Laiwui), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Jarak Terjauh dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Calon Kabupaten (Laiwui)

No	Nama Kecamatan di Wilayah Pulau Obi	Jarak (km)
1	Obi	1,00
2	Obi Selatan	74,90
3	Obi Utara	17,60
4	Obi Barat	24,40
5	Obi Timur	42,50
Rata-rata Jarak Kecamatan di Calon Kabupaten		32,08

Sumber : Analisa Data Penelitian, 2011

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa rentang kendali jika dimekarkan Kepulauan Obi menjadi kabupaten baru maka menjadi lebih pendek. Sehingga jangkauan pelayanan menjadi lebih dekat antara pemerintah dengan masyarakat.

Berdasarkan rentang kendali dengan pertimbangan akses jalan dan waktu tempuh yang sangat pendek, maka dengan adanya pemekaran wilayah Kepulauan Obi akan semakin timbul percepatan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, salah satu tujuan pemekaran daerah Kepulauan Obi adalah dengan mendekatkan pusat pemerintahan kepada masyarakat.

Gambar 2
Peta Provinsi Maluku Utara



Gambar 3
Peta Kabupaten Halmahera Selatan
Luas Pulau dan Jarak Kecamatan di Kepulauan Obi
ke Ibu Kota Kabupaten Induk



Bagian

3

PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI ELIT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI

A. Elit Pro Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi sudah pernah diwacanakan pada tahun 2005 bersamaan dengan Pembentukan Kabupaten Morotai. Tetapi karena syarat kewilayahan pada waktu itu belum memenuhi syarat, akhirnya tidak dibangun kembali wacana tersebut. Sementara itu, tahun 2006 pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi direncanakan kembali dan telah dilakukan dengan berbagai program kegiatan yang menunjang kearah terwujudnya calon Kabupaten, termasuk pemekaran desa dan kecamatan. Awalnya dari 20 desa dan 2 kecamatan sekarang menjadi 34 desa dan 5 kecamatan. Dengan demikian, secara fisik kewilayahan, wilayah Kepulauan Obi telah memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang adalah minimal 5 (lima) kecamatan.

Syarat fisik kewilayahan merupakan syarat terpenting dalam pemekaran daerah, 5 (lima) kecamatan yang disyaratkan dalam Undang-undang sudah dipenuhi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Obi secara administrasi sudah memenuhi, lima kecamatan tersebut yakni kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan,

Kecamatan Obi Utara, Kecamatan Obi Timur dan Kecamatan Obi Barat.

Gagasan dan motor penggerak utama dalam pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi berawal dari salah satu tokoh masyarakat Obi yang sekaligus sebagai Camat Obi, gagasan yang dibangun berdasarkan perkembangan dan perbandingan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Maluku Utara. Awal mula pembentukan Kabupaten Halmahera Timur, sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki hanya mencapai 3 ribu lebih jiwa penduduk dan bisa dimekarkan menjadi daerah otonom baru, sedangkan sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk yang ada di wilayah Kepulauan Obi mencapai 52.321 jiwa. Kepulauan Obi lebih banyak jumlah penduduknya jikalau dibandingkan dengan Kabupaten Halmahera Timur.

Selanjutnya juga, pembentukan Kabupaten Pulau Morotai dari sisi luas wilayah/daerah hanya memiliki 2.325 km² dibandingkan dari wilayah Kepulauan Obi yaitu 3.111 km². Perkembangan pasca pemekaran kedua daerah dimaksud belum mampu menunjukkan efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan harapan dan tujuan pemekaran daerah/wilayah itu sendiri, akan tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan memajukan daerah pasca pemekaran.

Dengan perbandingan kedua daerah tersebut, maka Kepulauan Obi setidaknya layak dijadikan atau menjadi kabupaten otonomi baru. Gerakan sosial masyarakat untuk semangat dalam memperjuangkan Kepulauan Obi menjadi daerah menjadi isu global dalam wilayah Kepulauan Obi,

apalagi isu pemekaran tersebut dihembuskan pada elit yang berada di Kepulauan Obi. Motor penggerak utama pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi sesungguhnya berasal dari elit yang ada dimasyarakat dan sekaligus elit yang berkuasa sebagai Camat Obi. Dari status yang dimiliki elit tersebut, maka upaya untuk mempertahankan *status quo* atau mendapatkan posisi jabatan dalam pemekaran daerah merupakan kepentingan yang harus dicapai.

Selain dari elit penggagas pemekaran daerah Kepulauan Obi, elit pro pemekaran juga berasal dari kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, birokrat, maupun akademisi. Berikut ini tabel yang menjelaskan elit-elit pro pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi dan sekaligus profesi yang dimiliki oleh elit.

Tabel 9
Elit-elit Pro Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi

No	Nama Elit	Profesi
1	Hi. Sampena La Goti	Pengusaha/Politisi
2	La Jaya La Musu	Politisi
3	Hi. Ibrahim	Pengusaha/Politisi
4	Hi. Subur	Pengusaha
5	Drs. Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag	Akademisi/Tokoh Masyarakat
6	Drs. Usman Borut, MM	Birokrasi
7	Ali Ode Madi, SP	Birokrasi
8	La Sihamu, S.IP	Birokrasi
9	Iksan Subur, S.Pd. M.Si	Birokrasi
10	Abu Karim La Tara, S.IP	Birokrasi/Tokoh Masyarakat/ Pengusaha
11	La Ode Kandia	Pengusaha
12	La Sahu Djafar	Pendidik/Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat
13	Drs La Sengka La Dadu	Birokrasi
14	Maslan Hi. Hasan, SH, M.Si	Birokrasi

15	Bahar Haji, S.Pd	Birokrasi
16	Idhar La Masa, SE	Politisi
17	Safar Sam, SH	Politisi
18	Jasmin Djafar, S.Ag, MM	Akademisi
19	Weinandus Kurama	Politisi
20	Yavet Moloku	Politisi
21	Leonardo Koling, SH	Politisi
22	Adi Cheng	Politisi

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas elit yang pro pemekaran daerah berasal dari para politisi, kemudian di ikuti para birokrat. Kepentingan para politisi dan birokrat pada setiap pemekaran daerah seringkali terjadi dalam pemekaran daerah dan itu merupakan hal yang lumrah demi kepentingan tertentu yang diinginkan, bagi-bagi dan distribusi kekuasaan dalam segala lini pemerintahan pasca pemekaran menjadi basis utama untuk mempertahankan dan mendapatkan kedudukan yang strategis.

Selain elit-elit Obi, suara pro dalam pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi juga muncul dari kalangan pihak akademisi dan mahasiswa. Pihak akademisi dan mahasiswa menilai Wilayah Kepulauan Obi selayaknya menjadi daerah otonom baru, karena dari aspek rentang kendali jauh dari pusat pemerintahan, memiliki sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan potensi daerah yang sangat memadai dan menunjang bagi kehidupan kesejahteraan masyarakat Obi. Kondisi wilayah Kepulauan Obi yang strategi sebagai daerah kepulauan, aspek geografis-rentang kendali yang jauh dari ibu kota Kabupaten Induk (Halmahera Selatan), memiliki potensi daerah yang memadai

baik itu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia menjadi alasan utama pro pemekaran.

Tuntutan pemekaran semata-mata kebutuhan masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di daerah. Peningkatan kesejahteraan rakyat berupa ; mempermudah pelayanan public yang lebih maksimal dalam jangkauan antar daerah/desa di wilayah Kepulauan Obi, memperpendek atau mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerataan infrastruktur yang selama ini dirasakan tidak merata, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pulau Obi. Selain itu, alasan utama yang mendasar tuntutan pemekaran daerah karena faktor geografis sebagai daerah kepulauan yang rentang kendali jauh dari ibu kota kabupaten induk.

B. Analisa Elit Kontra Pemekaran dan Kepentingannya

Dalam setiap pemekaran daerah, kemungkinan pasti terjadi adanya pro dan kontra pemekaran. Terjadinya pro dan kontra dalam pemekaran daerah tidak lain menyangkut masalah kepentingan masing-masing elit lokal yang ada di daerah. Di sisi lain, dengan adanya pemekaran daerah maka secara langsung dan otomatis dapat melakukan maneuver dan perebutan jabatan (Birokrasi dan Kepala Daerah) di kalangan elit menjadi momentum yang harus dicapai. Berbagai afiliasi-afiliasi yang harus dilakukan oleh beberapa elit agar dapat memuluskan kepentingannya, mulai dari berafiliasi dengan para politisi, birokrat, mahasiswa, maupun akademisi. Akan tetapi dari sisi lain, pemekaran daerah akan mengancam sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang selama ini dimiliki dan akan tetap mempertahankan sumberdaya-sumberdaya tersebut. Takut akan kehilangan

atau tergeser dari sumberdaya (*resource*) yang telah dimiliki menjadi alasan utama setiap orang dan/atau kelompok untuk menolak pemekaran daerah.

Pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi pernah juga diwacanakan elit kontra pemekaran pada tahun 2007. Meskipun sudah diwacanakan, tidak menjadi dasar pijakan untuk dapat melepaskan Kepulauan Obi menjadi kabupaten baru yang berotonom. Ketidakjelasan untuk melepaskan Kepulauan Obi menjadi kabupaten baru, karena elit yang kontra pemekaran tidak menjelaskan kepada masyarakat isi rekomendasi tentang pelepasan Kepulauan Obi dari wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Pihak kontra pemekaran yaitu elite yang ada di luar Kepulauan Obi dan memiliki sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang tidak dimiliki elit-elit yang pro pemekaran, pihak tersebut yaitu Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba).

Elit kontra pemekaran daerah, pada prinsipnya tidak serius mengagendakan pemekaran Kepulauan Obi menjadi kabupaten baru. Wacana yang dibangun dalam rangka untuk menyenangkan hati masyarakat dan mencari simpatisan dari masyarakat Obi untuk mendapatkan dukungan dalam Pilkada Kepala Daerah 2009 dan upaya memuluskan kepentingannya di wilayah Kepulauan Obi. Ketidakseriusan Bupati Muhammad Kasuba untuk melepaskan Kepulauan Obi, karena mempunyai kepentingan ekonomi (usaha bisnis). Bupati mempunyai 20 % saham di 3 (tiga) perusahaan yang telah beroperasi di Wilayah Kepulauan Obi. Selain kepentingan ekonomi yang dimiliki elit kontra pemekaran (Bupati), asset daerah di wilayah Kepulauan Obi baik itu di sektor pertambangan, perikanan, perkebunan dan pariwisata masuk dalam asset Pemerintah Daerah dan menjadi

penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Kepentingan ekonomi Bupati Muhammad Kasuba di wilayah Kepulauan Obi sejak tahun 2005, membuat wacana pemekaran daerah Kepulauan Obi mengalami kendala dalam proses administrasi. Walaupun pemekaran sudah diwacanakan, Bupati tetap tidak menyetujui pemekaran, sehingga prosesnya pun sangat lambat pada tingkat daerah. Kepentingan ekonomi Bupati di wilayah Kepulauan Obi sangat besar, sehingga tidak mau melepaskan Pulau Obi menjadi daerah otonom baru. Jika Pulau Obi dimekarkan menjadi kabupaten baru, maka tidak menutup kemungkinan upaya Bupati mempertahankan dan mengamankan kepentingannya menjadi sulit untuk di kontrol secara langsung. Karena Pulau Obi sudah menjadi kabupaten tersendiri dan Bupati yang terpilih juga pasti punya kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dalam usaha bisnis yang berada di Kepulauan Obi.

C. Persaingan Kelompok Elit Pro Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi

Pembentukan daerah otonom baru juga membuka ruang-ruang kekuasaan baru yang memperluas lahan bagi pertarungan politik di tingkat daerah. Elit-elit di daerah tidak urung memanfaatkan momentum ini demi kepentingan politik mereka. Untuk kepentingan politik mereka (elit), diantaranya adalah perebutan posisi-posisi strategis dengan tujuan penguatan eksistensi kepentingan kelompok yang dipikulnya. Ada lagi alasan yang sering tidak diungkap yaitu upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Akibatnya, dengan berbagai cara pula berupaya

memekarkan daerah sehingga bisa memperoleh jabatan atau kekuasaan di daerah. Apalagi bagi mereka yang sudah berjasa dalam memperjuangkan daerah pemekaran, sudah memposisikan diri sebagai pihak yang harus dapat bagian jatah kursi jabatan atau politik dan kekuasaan di daerah pasca pemekaran. Proses inilah yang melahirkan berbagai konflik di sejumlah daerah. Dengan adanya posisi strategis tersebut, tidak jarang para elit-elit di daerah memaksakan kehendak menurut kepentingan pribadi dan golongan kelompoknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Gagasan pemekaran daerah bermanfaat dari 2 (dua) aspek yang berbeda. Pertama, bagi elit pemekaran daerah dimaksudkan untuk merampung budaya kepentingan pribadi mereka; politik, ekonomi, maupun sosial. Kedua, bagi masyarakat luas; pemekaran daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Kepentingan adalah sesuatu yang mendorong tindakan individu pada beberapa tingkatan yang mendasar, kepentingan merupakan fenomena sosial yang intens. Kepentingan yang membuat orang mengambil tindakan, kepentingan mampu mensuplai energy (kekuatan) dan membuat orang bakti serta bekerja keras untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kepentingan seseorang akan menjadi suatu kekuatan yang cukup besar jika mampu menggerakkan dan menyakinkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh seseorang.

Sudah menjadi paradigma umum bagi semua kalangan dan tidak terbantahkan lagi bahwa pemekaran wilayah adalah upaya untuk bagi-bagi kekuasaan di tingkat lokal. Perputaran elit di tingkat daerah yang begitu lambat membuat elit lainnya merasa gatal, takut tidak kebagian jatah

jabatan. Bahkan sejumlah elit daerah yang sudah keenakan di kursi kekuasaan dan jabatan, terus mempertahankannya dengan berbagai cara, jabatan yang sudah dua periode terlewati kemudian hendak diteruskan kepada isteri, anak, menantu atau saudara melalui pencalonan dalam pilkada, sehingga muncul kecemburuan dari para elit lain yang juga haus kekuasaan.

Persaingan kepentingan di antara para elit lokal itu untuk memperebutkan kekuasaan dan jabatan sering tak bisa dihindari, termasuk melibatkan rakyat dalam wujud konflik horizontal. Akibatnya, dengan berbagai cara pula berupaya memekarkan daerah sehingga bisa memperoleh jabatan atau kekuasaan di daerah baru itu. Apalagi bagi mereka (elit lokal) yang sudah merasa berjasa dalam memperjuangkan daerah pemekaran, tentunya sudah memosisikan diri sebagai pihak yang harus dapat bagian jatah kursi jabatan atau politik dan kekuasaan di daerah baru itu, minimal harus mendapat jatah proyek di daerah pemekaran.

Persaingan kepentingan di antara kelompok elit pro dalam pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi sangat terlihat jelas pada egoisme masing-masing elit dalam mempertahankan dan/atau mendapatkan posisi strategis pasca pemekaran. Ada beberapa organisasi/forum yang dibentuk oleh elit-elit Obi dalam tuntutan pemekaran daerah, tujuan dari dibentuknya organisasi/forum disatu sisi untuk melakukan konsolidasi antara masyarakat dan elit Obi dan disisi lain karena untuk mempertahankan dan/atau mendapatkan kepentingan elit pasca pemekaran. Adapun organisasi/forum yang dibentuk oleh elit-elit Obi yaitu sebagai berikut :

1. Elit di wilayah Kepulauan Obi membentuk Forum Peduli Obi (FPO), penggerakannya oleh Camat Obi, dan para pengusaha.
2. Elit di Wilayah Bacan (Labuha-Ibu kota Kabupaten Halmahera Selatan) membentuk Ikatan Keluarga Obi (IKO). Penggerakannya para politisi, birokrasi, pengusaha, unsur mahasiswa dan tenaga pendidikan.
3. Elit di Wilayah Ternate, membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi. Penggerakannya dari unsur akademisi dan politisi.
4. Konsorsium Pemekaran dan Mahasiswa, berkedudukan di wilayah Kepulauan Obi. Konsorsium penggerakannya dari masyarakat Obi dan mahasiswa : gabungan berbagai mahasiswa dalam kecamatan di Kepulauan Obi yang kemudian menjadi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Obi (HIPMO).
5. Tim 5 (Lima), ditunjuk langsung Bupati Muhammad Kasuba, tanggal 12 April 2011 untuk bertemu dengan Komisi II⁴¹ dalam rangka untuk mempresentasikan

⁴¹ Ketua Komisi II Chairuman Harahap dan beberapa anggota melakukan kunjungan kerja (kuker) di Maluku Utara selama tiga hari. Dalam kunjungan kerja tersebut, rencananya Komisi II bisa turun langsung ke Obi dan Taliabu. Namun harapan tersebut kandas lantaran pertemuan Komisi II yang menyangkut aspirasi pemekaran dua daerah tersebut dilangsungkan di Ternate. Tidak bisa turun langsung, Chairuman lantas menyampaikan permohonan maaf tidak bisa mengunjungi Obi dan Taliabu dengan alasan ada agenda lain yang membuat komisi II harus segera ke Jakarta. Tetapi, melalui hasil pertemuan di Bella Internasional Ternate ini, komisi II tetap mendengar aspirasi masyarakat dan menjadi masukan, serta tetap akan menindaklanjuti usulan pemekaran dari masyarakat. Maluku Utara Post (Malut Post), 2011. *Minta Dimekarkan Tahun ini, Warga Obi dan Taliabu Nyaris Bajak Anggota Komisi II DPR*. Kamis, 14 April 2011.

kondisi wilayah kepulauan Obi sebagai calon kabupaten baru di Hotel Bella Internasional Ternate. Tim ini ditunjuk berdasarkan perwakilan daerah/wilayah kecamatan dan agama di wilayah Kepulauan Obi yaitu:

- a. Abu Karim La Tara, S.IP (Kecamatan Obi/Islam)
- b. Drs La Sengka La Dadu (Kecamatan Obi Selatan/ Islam)
- c. Khalik (Kecamatan Utara/Islam)
- d. Amos Kakiroba (Kecamatan Obi Timur/ Kristen)
- e. La Ali (Kecamatan Obi Barat/Islam)

Tugasnya Tim 5 (Lima) yakni mengawal proses pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi baik dari tahapan administrasi, teknis, kajian akademik dari Universitas Indonesia dan tahapan proses di DPR RI.

Tabel 10
Pemetaan Kelompok Elit Pro Pemekaran berdasarkan Etnis, Agama dan Profesi

Elit di Wilayah Kepulauan Obi

Nama Elit	Etnis	Agama	Profesi
1. Abu Karim La Tara	Buton	Islam	Camat Obi/Tokoh Masyarakat/Pengusaha
2. Hi. Subur	Tobelo	Islam	Pengusaha

Elit di Wilayah Labuha-Bacan (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan)

Nama Elit	Etnis	Agama	Profesi
1. La Jaya La Musu	Buton	Islam	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel
2. Ali Ode Madi, SP	Buton	Islam	Birokrasi/Inspektorat
3. La Sihamu, S.IP	Buton	Islam	Biroksasi/BPLHK
4. La Ode Kandia	Buton	Islam	Pengusaha/Kontraktor
5. La Sahu Djafar	Buton	Islam	Pendidik/Tokoh Agama/

6. Drs La Sengka La Dadu	Buton	Islam	Tokoh Masyarakat
7. Maslan Hi. Hasan	Buton	Islam	Birokrasi/Kemenag
8. Bahar Haji, S.Pd	Buton	Islam	Birokrasi
9. Idhar La Masa, SE	Buton	Islam	Birokrasi
10. Drs Usman Borut	Kei	Islam	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel
11. Safar Sam, SH	Tidore	Islam	Birokrasi/Kesbangpol
12. Hi. Ibrahim	Tobelo	Islam	Politisi
13. Iksan Subur, M.Si	Tobelo	Islam	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel
14. Weinandus Kurama	Tobelo	Kristen	Birokrasi
	Tobelo	Kristen	Politisi
15. Yavet Moloku	Tobelo	Kristen	Politisi
16. Leonardo Koling	Tiong	Kung	Politisi
17. Adi Cheng	Hoa	Hu Cu	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel

Elit di Wilayah Ternate (Provinsi Maluku Utara)

Nama Elit	Etnis	Agama	Profesi
1. Hi. Sampena La Goti	Buton	Islam	Anggota DPRD Kota Ternate
2. Drs Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag.	Buton	Islam	Akademisi/STAIN Ternate
3. Jasmin Djafar, S.Ag, MM	Buton	Islam	Akademisi/STAIN Ternate

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa persamaan etnis, agama dan profesi tidak serta merta menimbulkan persekutuan/ kebersamaan di antara kelompok elit pro pemekaran. Dalam proses memperjuangkan pemekaran daerah elit-elit Obi dari berbagai wilayah; Pulau Obi, Labuha-Bacan, dan Ternate bersama-sama dan bersatu untuk menyuarakan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi tanpa membedakan dari aspek etnis, agama dan profesi.

Tetapi perbedaan kepentingan masing-masing elit, menyebabkan terjadinya persaingan di antara elit-elit Obi yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tidak hanya satu elit atau kelompok yang terlibat di dalam proses pemekaran daerah, tetapi ada banyak elit yang terkait. Setiap elit memiliki peranan di dalam pemekaran daerah, memiliki gagasan-gagasan, kepentingan dan tujuan tersendiri di dalam pemekaran daerah tersebut. Beragam cara dilakukan oleh setiap elit yang terlibat untuk membuat gagasan mereka tercapai. Dalam setiap pemekaran daerah, ada elit-elit lokal yang menjadi inspirasi perjuangan dari pemekaran. Maka akan ada kemungkinan terjadinya persaingan dan pertarungan diantara masing-masing elit di dalam memperebutkan kekuasaan. Maka, pertarungan kepentingan elit tersebut tidak hanya terbatas antara pertarungan antar elit saja. Masyarakat akar rumput juga memiliki kepentingan yaitu untuk mendapatkan kesejahteraan.

Persaingan kepentingan (*interest*) di antara kelompok pro pemekaran terjadi antara elit di wilayah Pulau Obi dan di Ternate. Persaingan kelompok elit pro pemekaran menimbulkan disharmoni dan diskomunikasi di antara kelompok pro pemekaran. Persaingan kelompok pro pemekaran pada dasarnya adalah berebut pengaruh dan dukungan dari masyarakat Obi. Untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan dari massa/ masyarakat, maka elit-elit Obi membangun pencitraan/image supaya dapat dipercaya masyarakat dan dinilai sebagai elit Obi paling berperan dan berjasa dalam proses memperjuangkan pemekaran daerah. Bentuk pencitraan/image yang dilakukan oleh elit-elit Obi yaitu dengan membentuk

berbagai organisasi/ forum. Elit di wilayah Pulau Obi, untuk membangun imagenya selaku elit Obi dalam pemekaran daerah sehingga membentuk Forum Peduli Obi (FPO) dan begitu pula elit Obi lainnya yang ada di wilayah Labuha-Bacan (Ibu Kota Kabupaten) dengan membentuk Ikatan Keluarga Obi (IKO) dan elit Obi di Ternate membentuk panitia pemekaran kabupaten Kepulauan Obi.

Pertama, Elit di wilayah Pulau Obi. Pencitraan yang dibangun bahwa untuk melakukan pemekaran daerah maka harus membutuhkan dukungan dan gerakan sosial dari seluruh masyarakat setempat, sehingga membentuk suatu forum yang dinamakan Forum Peduli Obi (FPO) dan penggeraknya Abu Karim La Tara, S.IP/Camat Obi dan Hi. Subur/Pengusaha Obi. Forum dimaksud, kemudian dijadikan sebagai basis kekuatan masyarakat dan elit di Obi untuk menyatakan diri siap memekarkan daerah Kepulauan Obi menjadi kabupaten baru dan berpisah dengan Kabupaten Induk. Walaupun Forum Peduli Obi (FPO) sebagai basis gerakan sosial masyarakat Obi, tidak menutup kemungkinan forum tersebut dibentuk demi kepentingan segelintir elit Obi untuk mempertahankan dan/atau mendapatkan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) jika Obi dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Forum ini dibentuk selain untuk melakukan konsolidasi antara massa/ masyarakat dengan elit, juga sebagai forum kepentingan elit di Pulau Obi untuk mendekati diri pada massa/masyarakat sehingga bisa dinilai elit yang paling berjasa dan berperan penting dalam pemekaran daerah. Pengaruh kedekatan dengan massa/ masyarakat dalam satu wilayah di Pulau Obi dan status yang dimiliki oleh elit Obi; birokrasi, ekonomi, dan sosial ternyata mampu memobilisasi

massa/masyarakat Obi dari berbagai daerah; desa dan kecamatan dalam menyatukan aspirasi untuk menuntut pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.

Kedua, elit Obi di wilayah Labuha-Bacan (Kab. Halmahera Selatan). Pengaruh kedekatan dengan massa/masyarakat tidak terlalu dekat karena kondisi wilayah yang terpisah berada di wilayah Kabupaten. Maka image yang dibangunpun berbeda dengan elit yang berada di Pulau Obi, image yang dibangun untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari massa/masyarakat sehingga dapat dinilai mempunyai peranan penting dalam pemekaran. Pencitraan/image yang ditujukan yaitu dengan membentuk Ikatan Keluarga Obi (IKO), unsur penggerakannya; para politisi, birokrasi, pengusaha dan tenaga pendidik. Ikatan Keluarga Obi (IKO) ini kemudian dijadikan basis kekuatan elit Obi di wilayah Kabupaten, bahwa untuk mengakomodir kepentingan pemekaran dalam level kabupaten, maka merekalah yang mempunyai peranan penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Obi mengenai pemekaran daerah di level kabupaten. Sehingga masing-masing elit di kabupaten menunjukkan dirinya selaku orang Obi dan berjasa dalam pemekaran daerah. Berbagai aksi massa di Kabupaten Halmahera Selatan, yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat Obi untuk menuntut pemekaran daerah selalu difasilitasi oleh elit-elit Obi yang ada di Labuha-Bacan. Fasilitasi berupa penyiapan biaya perjalanan massa/ masyarakat dari Pulau Obi ke Kabupaten, tempat tinggal, makan-minum, bahkan segala kebutuhan yang menyangkut aksi massa diorganisir dan difasilitasi oleh elit-elit Obi di Kabupaten.

Ketiga, elit Obi yang ada di wilayah Ternate. Kondisi geografis yang jauh dari Pulau Obi dan hubungan dengan massa/ masyarakat juga tidak terlalu dekat, menyebabkan kelompok ini kurang dikenal oleh penduduk yang ada di Pulau Obi. Maka upaya untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan dari masyarakat, dengan cara membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi khusus di wilayah Ternate-Provinsi. Image yang dibangun yaitu untuk mengakomodir semua tuntutan pemekaran Kepulauan Obi di tingkat Provinsi, maka merekalah yang mempunyai peranan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemekaran di tingkat provinsi. Salah satunya lobi-lobi di DPRD Provinsi dan Gubernur Maluku Utara. Selain dari jasa sebagai pencetus Panitia Pemekaran Daerah di tingkat Provinsi, terselubung pula kepentingan para elit untuk memperebutkan jabatan kepala daerah dalam hal ini Bupati Kepulauan Obi.

Pencitraan yang dilakukan oleh elit pro pemekaran adalah untuk menunjukkan eksistensinya kepada kalangan massa/ masyarakat, bahwa elit inilah yang mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan pemekaran dan untuk membangun kepercayaan bahwa sesungguhnya merekalah yang paling berperan dan berjasa dalam proses pemekaran daerah. Sehingga hubungan antara elit dan massa selalu mempunyai relasi yang kuat. Elit-elit Obi berupaya menunjukkan jati dirinya dalam menyuarakan pemekaran daerah. Elit yang menonjol dalam pemekaran daerah Kepulauan Obi yaitu elit di Pulau Obi (Abu Karim La Tara, S.IP), elit ini selain sebagai elit birokrasi, ekonomi, juga merupakan elit sosial.

Kedekatan dengan masyarakat/massa di Pulau Obi menjadi modal sosial yang dimiliki elit Obi, sehingga pengaruhnya dalam proses pemekaran daerah sangat besar terutama dalam mempengaruhi masyarakat dan pengerahan massa. Tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat/massa lebih tinggi dibandingkan dengan elit-elit Obi lainnya. Dengan sumber daya (*resource*) yang dimiliki elit di Obi, kelompok ini berusaha memaksimalkan untuk menggunakan sumber daya dimaksud untuk mencapai tujuan-tujuan politisnya. Menurut Andrain bahwa kepemilikan sumber daya merupakan prasyarat yang tidak dapat dielakkan dalam kekuasaan. Tingkat efektivitas pendayagunaan kekuasaan tergantung seberapa besar jumlah sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya yang memperoleh penghargaan tinggi dari masyarakat dan relevan terhadap sasaran-sasarannya⁴².

Meskipun sumberdaya intelektual para elit di Ternate jumlahnya sangat terbatas, tetapi tetap mempunyai keinginan menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk tujuan politis. Hubungan dengan `masyarakat/massa tidak terlalu dekat, karena elit (Drs Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag) ini berada di Ternate. Kondisi wilayah membuat tidak terjalinnya relasi antara elit dengan massa. Sehingga masyarakat yang berada di Pulau Obi cenderung bersifat pesimis dan tidak terlalu mengetahui secara dekat eksistensi elit ini. Walaupun demikian, elit ini dapat menunjukkan peranannya dalam proses pemekaran daerah di tingkat Provinsi.

⁴² *Ibid*, hal 49

Tabel 11
Pemetaan Persaingan Kepentingan Kelompok Elit Pro
Pemekaran berdasarkan Wilayah, Etnis dan Agama

Nama Elit	Persaingan Kepentingan Elit Pro Pemekaran		
	Wilayah	Etnis	Agama
Abu Karim La Tara, S.IP	Pulau Obi	Buton	Islam
Drs Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag	Ternate	Buton	Islam

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa persamaan etnis dan agama ternyata tidak serta merta menimbulkan kebersamaan di antara kelompok elit pro pemekaran. Tetapi kondisi wilayah (geografis) dan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimiliki masing-masing elit mengakibatkan terjadinya persaingan elit di antara kelompok pro pemekaran. Persaingan terjadi berkaitan dengan kepentingan masing-masing elit dalam posisi strategis pasca pemekaran, terutama kepentingan politik dan ekonomi. Pemekaran daerah adalah bagian dari pertarungan elit untuk mendapatkan kekuasaan pada aras lokal. Akan tetapi, yang terjadi selama ini pertarungan elit ini justru tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat tetapi lebih pada kepentingan pribadi elit tersebut atau kelompoknya sendiri.

1. Elit di Obi : Kepentingan Politik dan Ekonomi

Pemekaran daerah otonom baru memberikan ruang bagi elit-elit lokal yang ada di daerah untuk menduduki posisi strategis baik di birokrasi dan politik. Di mata elite politisi, pemekaran daerah berarti pelebaran sumber daya politik dalam bentuk jabatan-jabatan politik

baru, baik kepala daerah maupun DPRD. Elite birokrasi juga akan mendapatkan keuntungan dengan promosi eselon dan jabatan struktural baru di daerah hasil pemekaran. Selain itu, elit ekonomi sebagai pelaku bisnis juga akan memetik keuntungan dari sirkulasi uang yang meningkat sejalan dengan pengembangan aktivitas ekonomi di daerah pasca pemekaran.

Ketika proses pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi, elit-elit Obi dari berbagai status sosial yang ada di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan dirinya sebagai orang yang paling berperan dan berjasa dalam proses pemekaran daerah. Elit di Pulau Obi ada statusnya sebagai birokrasi (Abu Karim La Tara, S.IP/Camat Obi), juga ada pihak pengusaha (Hi. Subur/Pengusaha Obi). Sehingga pemekaran daerah ini bisa dijadikan basis untuk meningkatkan dan memperluas sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimilikinya.

a. Elit Birokrasi (Abu Karim La Tara, S.IP)

Status sosial yang dimiliki elit Obi (Abu Karim La Tara) selain elit birokrasi, juga sebagai elit ekonomi. Sebagai seorang birokrat, kepentingan untuk mendapatkan posisi strategis yang lebih tinggi pasca pemekaran merupakan bagian yang harus diwujudkan, apalagi merasa sebagai orang yang paling berjasa dan berperan dalam proses pemekaran daerah. Kepentingan politik yang menonjol dari elit ini yaitu keinginan menduduki dan berusaha untuk memperebutkan jabatan kepala daerah pasca pemekaran.

Selain kepentingan politik, elit ini (Abu Karim La Tara) juga memiliki kepentingan ekonomi untuk mengamankan, melindungi dan memperlebar usaha bisnisnya di wilayah Kepulauan Obi. Abu Karim La Tara, punya perusahaan Nikel PT. Obi Putra Mandiri yang beroperasi di kawasan desa baru dan desa kawasi dalam wilayah Kecamatan Obi. Dengan status sebagai Camat Obi dan sumberdaya kekuasaan yang dimiliki, maka kepentingan ekonomi tidak terelakkan demi untuk mendapatkan keuntungan. Kepentingan pribadi dalam ekonomi merupakan modal penting untuk mampu mencapai kepentingan politisnya. Sehingga selain dari sumberdaya kekuasaan, juga memiliki sumberdaya kekayaan. Dengan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimiliki oleh Abu Karim La Tar, membuat dia bersemangat memperjuangkan kepentingan politiknya agar tercapai.

b. Pihak Pengusaha (Hi. Subur)

Dalam proses pemekaran wilayah/daerah Kabupaten Kepulauan Obi, elit-elit Obi yang berperan tidak hanya para politisi dan birokrasi, akan tetapi terlibat juga pihak pengusaha. Selaku pengusaha ternama di Pulau Obi (Hi. Subur), maka gagasan pemekaran daerah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan memperlebar usaha bisnisnya di wilayah Pulau Obi. Hi. Subur memiliki Perusahaan Tambang Emas yaitu PT. Berkat Karya Mineral yang beroperasi di kawasan desa Air Mangga, Anggai, dsk dalam wilayah Kecamatan Obi.

Selain perusahaan tambang emas yang dimiliki, elit ini juga mempunyai perusahaan tambang batu

bara di kawasan Desa Kello dan sekitarnya dalam wilayah Kecamatan Obi Timur. Kepentingan (*interest*) ekonomi para pengusaha dalam pemekaran daerah sering terjadi, bahkan pemekaran daerah dijadikan sebagai ruang para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi; pelebaran usaha bisnis, dan pembagian jatah proyek dari pemerintah. Kepentingan ekonomi bagi pengusaha di daerah pemekaran menjadi faktor utama untuk meningkatkan usaha bisnisnya.

Dengan pelbagai sumberdaya yang dimilikinya, mereka mempunyai beberapa alternatif pilihan dalam rangka pemanfaatannya. Pertama, ada kemungkinan mereka akan menghabiskan sekaligus sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai macam kegiatan, termasuk kegiatan non politik. Kedua, ada kemungkinan mereka melakukan penghematan dalam menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya dengan maksud agar dapat dipergunakan pada waktu yang akan datang. Ketiga, kemungkinan mereka akan menginvestasikan sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah sumberdaya-sumberdaya tersebut. Keempat, ada kemungkinan mereka akan mengkonversikan sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya menjadi kekuasaan politik⁴³.

2. Elit di Ternate : Kepentingan Politik

Umumnya, kekuasaan sifatnya terbatas dan menjadi perebutan dari berbagai kelompok manapun, maka konflik pasti akan terjadi antara elit atau kelompok.

⁴³ *Ibid*, hal 51

Konflik bisa muncul dari elit satu dengan lainnya atau dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok yang berbeda serta antara kelompok penguasa dengan kelompok tandingan. Nuansa-nuansa dalam pertentangan kekuasaan, menunjukkan tingkat perbedaan kepentingan di antara elit dan kelompok-kelompok yang berbeda.

Tidak meratanya distribusi kekuasaan dalam lingkungan masyarakat, dapat melahirkan kecemburuan sosial diantara elit dan kelompok masyarakat, sehingga terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan menjadi faktor paling menonjol pada daerah kabupaten baru, ini menunjukkan bahwa faktor politik jauh lebih dominan, karena pihak-pihak yang berkontestasi adalah pemain lama dalam jajaran politisi dan birokrat daerah sebelumnya, semua itu dapat terjadi karena pemekaran daerah lebih banyak didorong dan dirangsang kepentingan segelintir elit lokal yang ada di daerah.

Dalam proses pemekaran daerah Kepulauan Obi, elit di Ternate membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi, motor penggeraknya dari pihak akademisi (Drs.Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag). Pembentukan panitia pemekaran sebagai bentuk peranannya selaku elit Obi dalam memperjuangkan pemekaran. Tetapi juga kemungkinan elit ini mempunyai kepentingan tertentu pasca pemekaran. Elit di Ternate memiliki kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan ; perebutan jabatan kepala daerah jika Kepulauan Obi dimekar menjadi kabupaten.

Dimiliki elit di Ternate sumberdaya jumlahnya terbatas jika di bandingkan dengan kelompok elit yang

lain. Akan tetapi, keterbatasan sumberdaya elit di Ternate tidak mempengaruhi kepentingan politiknya. Elit ini tetap berusaha mencapai kepentingannya, menunjukkan posisinya sebagai elit Obi dengan melakukan konsolidasi dengan elit-elit Obi lain yang mempunyai sumberdaya-sumberdaya yang tidak dimilikinya. Sifat saling tergantung satu terhadap lainnya yang melekat pada diri setiap elit dapat dinyatakan sebagai hasil dari beberapa struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat. Struktur sosial yang penting di lingkungan masyarakat adalah ekonomi, militer, agama, dan politik. Selain dari konsolidasi yang dibangun, elit di Ternate juga memiliki peranan dalam proses pemekaran di tingkat Provinsi; terlihat pada pertemuan dengan Komisi II di Kota Ternate⁴⁴.

Keterbatasan jumlah sumberdaya (*resource*) yang dimiliki elit, tidak berarti elit tersebut tidak mampu mencapai kepentingan politiknya. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki bisa menjadi satu pemicu untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara maksimal. Tidak jarang suatu kelompok yang memiliki sumberdaya terbatas, tapi mampu mencapai tujuan-tujuan politiknya. Sementara kelompok dengan ragam dan jumlah sumberdaya yang besar tetapi anggotanya bersifat apatis dan kurang berdedikasi, ternyata kurang berhasil mencapai tujuan-tujuan

44 Dalam pertemuan ini, Elit di Ternate mengatasnamakan dirinya sebagai tokoh masyarakat Obi dan selaku orang yang mempunyai peranan dalam pengurusan pemekaran daerah Kepulauan Obi di tingkat Provinsi. Maluku Utara Post (Malut Post), 2011. *Minta Dimekarkan Tahun ini, Warga Obi dan Taliabu Nyaris Bajak Anggota Komisi II DPR*. Kamis, 14 April 2011.

politiknya. Hal ini dikarekan motivasi yang ada pada kelompok pertama jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kedua.

Elit di Obi (Penggerak FPO; Abu Karim La Tara, S.IP) tidak mau bergabung atau melebur menjadi satu organisasi/forum dengan elit di Ternate (penggerak Panitia Pemekaran; Drs.Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag), hal ini menunjukkan diantara elit-elit pro pemekaran memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, upaya untuk menyatukan elit-elit yang berbeda kepentingan semestinya harus dilakukan demi kepentingan memperjuangkan pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.

Persaingan kepentingan elit pro pemekaran terjadi antara elit di Kepulauan Obi dan elit di wilayah Ternate. Perebutan kepentingan diantara masing-masing elit merupakan sumber persaingan elit. Kepentingan kedua elit yaitu untuk memperebutkan posisi jabatan kepala daerah dan sumberdaya ekonomi di Pulau Obi. Sehingga keberadaan mereka sebagai motor penggerak pemekaran menjadi modal awal untuk mendapatkan balas jasa jika tuntutan pemekaran berhasil. Wajar saja jika mempunyai kepentingan mendapatkan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) pasca pemekaran nanti. Rivalitas yang paling menonjol yaitu perebutan kursi jabatan kepala daerah. Jabatan Kepala Daerah (Bupati) pasca pemekaran menjadi modal dasar untuk mempertahankan dan/atau mendapatkan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) baik itu sumberdaya politik maupun ekonomi.

D. Latar Belakang Konspirasi Elit Pro & Kontra Pemekaran

Sejak tahun 2003 pasca pemekaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan bersamaan dengan beberapa daerah lain yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan yang ada di Provinsi Maluku Utara, wilayah Kepulauan Obi merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan memiliki potensi sumberdaya alam cukup memadai. Luas wilayah 3.111 km² menyimpan berbagai potensi alam yang tidak dimiliki pulau lain di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan sumberdaya alam yang dimiliki baik itu di sektor pertambangan, perikanan maupun perkebunan, maka wilayah Kepulauan Obi dijadikan sebagai ladang usaha bisnis demi kepentingan masing-masing elit yang ada di daerah.

Sumberdaya alam paling dominan di Pulau Obi yaitu di sektor pertambangan; emas, nikel, tembaga, pasir besi dan batu bara. Sektor pertambangan di wilayah Kepulauan Obi merupakan bagian sumberdaya alam yang dijadikan usaha bisnis para elite. Sehingga elit-elit baik itu di wilayah Kepulauan Obi maupun di luar Kepulauan Obi memiliki kepentingan sangat besar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Elit berkonspirasi dalam pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi adalah elit pro dan kontra pemekaran. Konspirasi terjadi dikarenakan elit pro dan kontra pemekaran memiliki kepentingan yang sama yaitu kepentingan ekonomi; untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*privat*), mempertahankan dan mengamankan usaha bisnisnya yang berada di wilayah Kepulauan Obi. Selain

keterkaitan dalam kepentingan ekonomi (urusan bisnis), ada pula relasi yang dilakukan oleh pihak kontra; Bupati dengan elit di wilayah Kepulauan Obi (Abu Karim La Tara dan Hi. Subur). Relasi yang dibangun antara elite pro dan kontra dimaksud, untuk memenangkan pihak kontra (Bupati) dalam kontestasi Pemilukada di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2009 lalu, yang kemudian Bupati Muhammad Kasuba terpilih kembali.

Pihak pengusaha (Hi Subur) karena statusnya sebagai pengusaha ternama di wilayah Obi menyumbangkan dana pada pihak Bupati, dengan jaminan apabila Bupati terpilih kembali, maka segala urusan perusahaan yang dimiliki Hi. Subur berjalan dengan mulus tanpa kendala yang dihadapi dalam proses perijinan usaha maupun lainnya. Sedangkan Abu Karim La Tara selain sebagai Camat Obi, juga seorang pengusaha di Obi, sehingga relasinya dengan Bupati selain untuk mempertahankan statusnya sebagai Camat Obi, juga punya kepentingan untuk mengamankan/memuluskan segala urusan yang berkaitan dengan perusahaannya.

Tabel 12
Elit-elit yang Berkonspirasi dalam Pemekaran
Kabupaten Kepulauan Obi

Pemekaran Daerah		Keterangan
Pro	Kontra	
1. Abu Karim La Tara	Bupati Halmahera Selatan	Konspirasi dalam kepentingan ekonomi di wilayah Kepulauan Obi
2. Hi. Subur	(Muhammad Kasuba)	

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa terjadinya konspirasi elit pro dan kontra pemekaran karena adanya kepentingan ekonomi (usaha bisnis) di wilayah Kepulauan Obi dan kedekatan dalam hal penyumbang dana diantara elit-elit berkonspirasi. Konspirasi dibangun semata-mata untuk melindungi dan mempertahankan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang telah dimiliki masing-masing elit. Elit pro pemekaran, memiliki perusahaan yang beroperasi di Kepulauan Obi dan begitu pula Elit kontra pemekaran.

Para elit melakukan persekongkolan secara sadar dan bersama-sama dalam merancang dan mengimplementasikan kepentingannya. Pembagian kawasan atau lokasi perusahaan di Pulau Obi tidak terlepas bagian dari settingan yang dilakukan oleh Elit kontra pemekaran, karena statusnya lebih dominan dari elit pro pemekaran. Hasil tambang; nikel di Pulau Obi yang paling banyak berada di desa Kawasi dan sekitarnya yang ada di Kecamatan Obi, pilihan lokasi hasil tambang yang dilakukan pihak kontra pemekaran sangat tepat, karena lokasi ini sangat strategis dari sisi ekonomi dan geografis. Sementara elit pro pemekaran dengan lokasi tambangnya tersendiri, Abu Karim La Tara memiliki perusahaan tambang nikel di dekat lokasi elit kontra pemekaran, sedangkan Hi. Subur lebih memilih tambang emas yang ada di desa Air Mangga, Anggai, dsk dalam Kecamatan Obi dan tambang batu bara di desa Kello dalam Kecamatan Obi Timur. Pilihan lokasi penambangan antara elit pro dan kontra pemekaran, dalam satu lokasi kecamatan menunjukkan adanya konspirasi dalam ekonomi. Motif dari konspirasi yaitu kepentingan ekonomi, demi untuk merauk keuntungan yang lebih banyak dan menjadi modal ekonomi

setiap elit untuk mencapai kepentingan-kepentingan lainnya yang tersembunyi.

Konspirasi diantara elit pro dan kontra pemekaran terjadi karena masing-masing pihak elit memiliki tujuan yang sama yaitu kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang ada di Pulau Obi. Motif kepentingan ekonomi diantara elit ini tidak dimiliki oleh elit-elit Obi lainnya, sehingga tidak terjadinya relasi diantara elit yang berkonspirasi. Elit-elit Obi lainnya cenderung dengan kepentingannya sendiri; baik politisi, birokrat, akademisi. Bahkan, konspirasi elit pro dan kontra tidak diketahui sebagian oleh elit-elit Obi yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kondisi geografis dan terpolarisasinya elit-elit Obi dari berbagai wilayah, menjadi faktor utama sehingga kepentingan setiap elit tidak saling mengetahui.

Gambar 4
Peta Penyebaran Perusahaan yang dimiliki
Elit yang berkonspirasi



Keterangan :

- ▲ Perusahaan Milik Bupati Muhammad Kasuba
- ◆ Perusahaan Milik Abu Karim La Tara/Camat Obi
- Perusahaan Milik Hi. Subur/Pengusaha Obi

Bagian

4

KONFIGURASI ELITE DALAM PEMEKARAN KABUPATEN KEPULAUAN OBI

A. Pengantar

Suara masyarakat dalam mendukung pemekaran menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Dalam konstelasi peraturan perundangan yang berlaku saat ini, peran masyarakat belum secara tegas dituangkan sehingga dalam praktek penyelenggaraannya suara masyarakat hanya diwakili oleh elit-elit lokal saja yang ada di daerah. Konteks pemekaran daerah Kepulauan Obi, gagasan pemekaran daerah berasal dari elit yang ada di Kepulauan Obi. Elit tersebut yaitu Abu Karim La Tara selaku Camat Obi, untuk menyukseskan gagasan pemekaran, maka membentuk Forum Peduli Obi (FPO) yang dihadiri seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD) se-Kepulauan Obi untuk menyatakan sikap dan mendukung pemekaran Kepulauan Obi.

Tidak hanya elit di wilayah Kepulauan Obi, elit-elit di wilayah Labuha-Bacan Ibu Kota Kabupaten Halmahera Selatan juga membentuk Ikatan Kelurga Obi (IKO) dan menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Kepulauan Obi. Selain elit-elit yang berada di wilayah Kepulauan Obi dan Labuha-Bacan, elit-elit yang berada di wilayah Kota

Ternate juga ikut dalam membentuk Panitia Pemekaran Daerah Kabupaten Kepulauan Obi, tentu ini sebagai bagian dari manifestasi dukungan terhadap pemekaran daerah.

Konfigurasi elit dalam pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi ternyata terjadi perpaduan antara aspek etnisitas dan aspek agama, sedangkan aspek geografis terjadi perbedaan dan disharmoni diantara elit-elit Obi. Perbedaan dan disharmoni diantara elit-elit berdasarkan kepentingan masing-masing, sehingga menimbulkan persaingan dan perbedaan kepentingan elit pro dalam pemekaran, disatu sisi untuk mempertahankan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimiliki oleh elit dan disisi lain kepentingan untuk mendapatkan distribusi kekuasaan pasca pemekaran.

B. Aspek Geografis

Indonesia merupakan negara kontinental yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 18 A menyebutkan bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Konsekuensi logis dari negara kepulauan, banyak daerah menuntut dan menginginkan pemekaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerahnya.

Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom. Keadaan geografi, berpengaruh kuat, terlihat dalam berbagai segi dan bersifat

universal, sehingga dipakai menjadi daerah otonom. Konsep pemberian otoritas kepada daerah karena adanya sejumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah, dimana kelompok itu mempunyai perbedaan dan kepentingan. Perbedaan geografi selain menjadi dasar terbentuknya suatu identitas bersama suatu kelompok, juga pembentuk perbedaan karakteristik wilayah, masalah, dan kewenangan masing-masing daerah otonom. Berdasarkan geografi, daerah memiliki ciri-ciri setempat, kondisi dan kepentingan serta masalah yang dibentuk oleh karakteristik geografinya yang berbeda itu.

Pemekaran daerah bagian dari pemisahan beberapa daerah menjadi daerah yang berotonom sendiri. Pemisahan dalam arti melepaskan diri dari daerah induk (kabupaten/kota) dan/atau membentuk daerah baru dalam wilayah provinsi. Pemekaran daerah tidak terlepas dari adanya berbagai dimensi pemicu munculnya tuntutan pemekaran daerah otonom baru, dimensi tersebut bisa dilihat dari (1) dimensi politik ; faktor geografi, faktor sosial budaya, faktor demografi, dan faktor sejarah, (2) dimensi administrasi/teknis dan (3) dimensi kesenjangan antar wilayah.

Kondisi geopolitik dan strategi wilayah dari Kepulauan Obi, menjadi dasar alasan pembentukan daerah. Selain itu, dari sisi rentang kendali sangat jauh dari pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Induk Halmahera Selatan. Untuk menuju ke ibu kota Kabupaten Induk, satu-satunya alat transportasi yang digunakan yaitu transportasi laut. Aspek geografis bagian dari faktor tuntutan masyarakat untuk pemekaran daerah. Wilayah yang jelas batas-batasnya merupakan faktor yang sulit diabaikan dalam proses

pembentukan suatu daerah. Suatu wilayah tidak hanya tempat untuk bermukim dan menjadi batas berlakunya kewenangan pemerintah, tetapi juga sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat.

Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah aspek yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik antara masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Ikatan-ikatan tersebut, dapat saja dilatar belakangi oleh kesatuan geografis maupun sejarah, sehingga masyarakat merasa dihubungkan oleh suatu ikatan secara politis. Kuat lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan politis⁴⁵.

Faktor geografis, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Masyarakat yang terpisah secara geografis, cenderung membentuk komunitas tersendiri dan akan menjadi dasar pembentukan kelompok masyarakat.

Dalam konteks wilayah Kepulauan Obi, terpolarisasinya masyarakat Obi terutama para Elit-elit berdasarkan geografis, menjadikan persaingan dan perbedaan kepentingan di kalangan para elit. Identitas sebagai putra daerah Kepulauan Obi dan satu wilayah tidak berarti memperkuat ikatan diantara masing-masing elit. Akan tetapi, perbedaan geografis atau wilayah dalam melakukan aktivitas sebagai birokrasi, politisi, dan akademisi

⁴⁵ M. Zaki Mubarak, 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center). hal. 120-130.

menimbulkan persaingan dan perbedaan kepentingan elit dalam memperjuangkan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi.

Tabel 13
Pemetaan Elit-elit Obi berdasarkan Wilayah

1. Elit di Wilayah Kepulauan Obi

Nama Elit	Profesi	Keterangan
1. Abu Karim La Tara, S.IP	Camat Obi/Tokoh Masyarakat/ Pengusaha	Membentuk organisasi Forum
2. Hi. Subur	Pengusaha	Peduli Obi (FPO)

2. Elit di Bacan (Labuha-Ibu kota Kab. Halmahera Selatan)

Nama Elit	Profesi	Keterangan
1. La Jaya La Musu	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel	Membentuk Ikatan Keluarga
2. Hi. Ibrahim	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel	Obi (IKO)
3. Drs. Usman Borut	Birokrasi	
4. Ali Ode Madi, SP	Birokrasi	
5. La Sihamu, S.IP	Biroksasi	
6. Iksan Subur, M.Si	Birokrasi/Non Job	
7. La Ode Kandia	Pengusaha	
8. La Sahu Djafar	Pendidik/Tokoh Agama/Masyarakat	
9. Drs La Sengka La Dadu	Birokrasi/ Kemenag	

Nama Elit	Profesi	Keterangan
10. Maslan Hi. Hasan, M.Si	Birokrasi	Membentuk Ikatan Keluarga Obi (IKO)
11. Bahar Haji, S.Pd	Birokrasi	
12. Idhar La Masa, SE	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel	
13. Safar Sam, SH	Politisi	
14. Weinandus Kurama	Politisi	
15. Yavet Moloku	Politisi	
16. Leonardo Koling, SH	Politisi	
17. Adi Cheng	Anggota DPRD Kab. Hal-Sel	

3. Elit di Wilayah Ternate (Tingkat Provinsi Maluku Utara)

Nama Elit	Profesi	Keterangan
1. Hi. Sampena La Goti	Anggota DPRD Kota Ternate	Membentuk Panitia Pemekaran Obi di Tingkat Provinsi
2. Drs Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag	Akademisi/STAIN Ternate	
3. Jasmin Djafar, S.Ag, MM	Akademisi/STAIN Ternate	

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian, 2011

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbedaan geografi atau wilayah masing-masing elit melahirkan pula persaingan dan perbedaan kepentingan. Sehingga tidak terjadi perpaduan antara elit yang ada di wilayah Obi, elit di wilayah Labuha-Bacan, dan elite yang ada di wilayah Ternate. Faktor kepentingan elit dalam perebutan jabatan ; kepala daerah, kepala dinas maupun jabatan lain

yang strategis menjadi faktor utama disharmoni dan terpolarisasinya diantara elit-elit Obi.

C. Aspek Etnisitas

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis dan ras (*multi ethnic*), kondisi ini kemudian dapat dikategorikan lagi dalam golongan-golongan berdasarkan status sosial, ekonomi, politik dan agama. Perbedaan-perbedaan demikian memang merupakan kekayaan dalam suatu masyarakat. Dengan perbedaan dimaksud, maka muncullah ikatan-ikatan antara etnis satu dengan lainnya.

Ikatan kekerabatan atau primordial (darah dan keluarga) dan kesamaan suku, bahasa, dan adat-istiadat merupakan faktor terjadinya ikatan yang erat di dalam masyarakat. Faktor etnisitas menjadi faktor utama dalam memperjuangkan pemekaran daerah, tidak diakomodasinya kepentingan etnis tertentu dalam level pemerintahan menimbulkan rasa tidak percaya pada etnis yang memerintah. Sehingga faktor etnisitas sering dijadikan sebagai basis kekuatan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang sesama etnis.

Etnisitas tetap ada karena berkait dengan kebutuhan akan identitas-identitas seseorang atau kelompok suatu masyarakat. Meskipun terdapat kesamaan-kesamaan yang besar dengan etnis lain, hal itu tidak menghalangi untuk tetap merasa berbeda. Identitas etnis yang diperkuat, dimana identitas etnis semakin kerap ditonjolkan dalam kehidupan sosial seperti yang terjadi belakangan ini di daerah lain. Etnis dijadikan alat politik untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi dalam meraih sumberdaya-sumberdaya (*resource*) tertentu.

Meskipun demikian, perbedaan etnisitas dalam suatu wilayah juga dapat membentuk suatu ikatan masyarakat yang solid. Terbentuknya ikatan masyarakat diantara beberapa etnis karena kesamaan wilayah dalam satu kepulauan. Perasaan senasib dan seperjuangan dalam melakukan aktivitas (bercocok tanam, nelayan) sebagai masyarakat kepulauan tentu menjadikan ini sebagai suatu kekuatan yang dibangun berdasarkan kearifan lokal masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika merasa tidak diperhatikan dalam urusan pelayanan yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, pemerataan pembangunan, maka menimbulkan keresahan masyarakat untuk melakukan gerakan menuntut pemekaran daerah.

Gerakan sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk menuntut pemekaran daerah tidak hanya dilakukan oleh satu etnis yang dominan, tetapi perpaduan antara beberapa etnis yang ada di wilayah tersebut. Perpaduan etnis dimaksud, untuk memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa sesungguhnya masyarakat dalam suatu daerah bersatu menginginkan pemekaran daerah. Walaupun ada kepentingan-kepentingan politik yang tersembunyi yang dilakukan oleh etnis tertentu.

Wilayah kepulauan Obi mayoritas penduduknya berasal dari 2 (dua) etnis yaitu etnis Buton dan Tobelo. Begitu pula dengan elit-elit Obi, mayoritas dari etnis Buton dan Tobelo. Namun, etnis yang ada di wilayah kepulauan Obi tidak ada etnis asli dan etnis Obi disebut sebagai etnis pendatang. Semua etnis-etnis yang ada di wilayah Kepulauan Obi berasal dari berbagai daerah, etnis Buton berasal dari Sulawesi Tenggara, etnis Tobelo dari kepulauan Halmahera, etnis Kei dari Tual-Maluku, etnis Bugis dari

Makassar-Sulawesi Selatan, etnis Sanana dari Kepulauan Sula, etnis Tidore dari Kota Tidore, dan etnis Makian dari Kepulauan Makian-Halmahera, yang kemudian menetap di wilayah Kepulauan Obi.

Tabel 14
Pemetaan Elit-elit Obi Berdasarkan Aspek Etnisitas

No	Nama Elit	Etnisitas				
		Buton	Tobelo	Kei	Tiong hoa	Tidore
1	2	3	4	5	6	7
1	Hi. Sampena La Goti	Buton				
2	La Jaya La Musu	Buton				
3	Hi. Ibrahim		Tobelo			
4	Hi. Subur		Tobelo			
5	Hi.Amin Dali La Patiani,M.Ag	Buton				
6	Drs. Usman Borut, MM			Kei		
7	Ali Ode Madi, SP	Buton				
8	La Sihamu, S.IP	Buton				
9	Iksan Subur, S.Pd. M.Si		Tobelo			
10	Abu Karim La Tara, S.IP	Buton				
11	La Ode Kandia	Buton				
12	La Sahu Djafar	Buton				
13	Drs La Sengka La Dadu	Buton				
14	Maslan Hi. Hasan, SH, M.Si	Buton				
15	Bahar Haji, S.Pd	Buton				

16	Idhar La Masa, SE	Buton				
17	Safar Sam, SH					Tidore
18	Jasmin Djafar, S.Ag, MM	Buton				
19	Weinandus Kurama		Tobelo			
20	Yavet Moloku		Tobelo			
21	Leonardo Koling, SH		Tobelo			
22	Adi Cheng				Tiong hoa	

Sumber : Analisis Data Hasil Penelitian, 2011

Ketika pemekaran daerah otonomi baru, maka identitas sering ditonjolkan sebagai basis untuk menghimpun dukungan dari masyarakat. Etnis bagian dari identitas yang selalu dibangun antara masyarakat dengan elit lokal, etnis mana yang paling dominan dalam suatu daerah dalam menuntut pemekaran maka etnis yang bersangkutan akan lebih menonjolkan bahwa pemekaran daerah karena jasa elit yang berasal dari etnis mayoritas.

Ketika suatu kelompok memenangkan untuk menonjolkan identitasnya itu dalam pemekaran, tidak serta merta akan menimbulkan konflik etnis diantara elit. Tetapi yang terjadi kemudian adalah hidup berdampingan dengan langgeng tanpa adanya penyerobotan wilayah atau kekuasaan atas etnis yang dominan. Dominannya suatu etnis di wilayah yang baru dimekar atau dibentuk menjadi daerah otonom baru, tidak mencoba untuk mengusir etnis lain di wilayahnya, tapi bersama-sama membangun wilayah yang baru mekar tersebut lebih maju. Perbedaan etnis dalam wilayah Kepulauan Obi tidak serta merta terjadinya polaritas diantara masyarakat dan elit Obi. Namun, dengan perbedaan

etnis mereka bersatu demi memperjuangkan pemekaran daerah. Dan tidak ada etnis yang mengaku sebagai penggagas pemekaran, tapi ini atas semua etnis untuk menuntut pemekaran daerah Kepulauan Obi.

D. Aspek Agama

Kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat dalam suatu wilayah adalah merupakan faktor yang kuat membentuk suatu ikatan berdasarkan ajaran-ajaran agama. Kondisi agama dalam wilayah suatu daerah sangat menentukan corak kehidupan masyarakat dalam sehari-hari, terutama dalam melakukan aktivitas peribadatan. Agama kadangkala menjadi ciri identitas yang penting bagi suatu etnis, tapi kadangkala tidak berarti apa-apa dan hanya sebagai kepercayaan yang dianut anggota etnik tertentu.

Wilayah Kepulauan Obi merupakan wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang sudah mendarah daging, masyarakat Kepulauan Obi sudah tersosialisasi dengan keragaman agama sejak terbentuknya Moloku Kie Raha (Maluku Utara). Penyebaran agama di wilayah Kepulauan Obi tidak terlepas dari adanya 4 (empat) kerajaan yang berada di jazirah Maluku Utara, keempat kesultanan dimaksud adalah Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan. Secara keseluruhan dapat dibedakan dalam 3 (tiga) wilayah penyebaran agama, yaitu :

1. Wilayah Kesultanan Ternate meliputi Kepulauan Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sula,

2. Wilayah Kesultanan Tidore mencakupi Kepulauan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, dan
3. Wilayah Kesultanan Bacan meliputi Kepulauan Bacan dan Pulau Obi.

Pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi bagian dari perjuangan dari seluruh masyarakat dan elit-elit Obi yang harus dicapai untuk menjadi daerah otonom baru. Aspek agama dalam pemekaran daerah menjadi kekuatan politik masyarakat dan elit-elit untuk memperjuangkan pemekaran daerah. Karena, seluruh elit-elit Obi bersama-sama menyatukan tekad untuk memperjuangkan dan memekarkan Kepulauan Obi menjadi Kabupaten tanpa membeda-bedakan dari sisi agama. Walaupun agama di Kepulauan Obi mayoritasnya berasal dari Agama Islam (67,3 %), dan Kristen (32,4 %) dan sisanya berasal dari agama Kong Hu Cu (0,3 %), para elit-elit Obi tetap bersatu menyuarakan tuntutan atas pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.

Diantara pemeluk agama baik masyarakat maupun elit Obi, terikat dalam satu ikatan toleransi dan keluarga besar diantara suku dan pulau. Keterikatan antara beberapa etnis karena berdasarkan sejarah pada masa lalu (Moloku Kie Raha). Faktor sejarahlah, yang merupakan pilar utama penyebaran agama di wilayah Kepulauan Obi. Sehingga agama satu dengan lainnya memiliki ikatan yang tidak bisa dilepaskan dari etnis. Agama yang mayoritas (Islam) di Kepulauan Obi itu berasal dari etnis Buton, sedangkan agama Kristen berasal dari etnis Tobelo. Meskipun demikian, etnis Tobelo juga sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.

Dengan beberapa agama yang ada di wilayah Kepulauan Obi, tidak secara otomatis mengalami perbedaan dalam hal kepentingan pemekaran daerah. Akan tetapi, dengan agama seluruh masyarakat Pulau Obi dan para elit-elit Obi bersatu dan berjuang demi pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi.

Tabel 15
Pemetaan Elit-elit Obi Berdasarkan Aspek Agama

No	Nama Elit	Agama		
		Islam	Kristen	Kong Hu Cu
1	2	3	4	5
1	Hi. Sampena La Goti	Islam		
2	La Jaya La Musu	Islam		
3	Hi. Ibrahim	Islam		
4	Hi. Subur	Islam		
5	Drs Hi. Amin Dali La Patiani, M.Ag	Islam		
6	Drs. Usman Borut, MM	Islam		
7	Ali Ode Madi, SP	Islam		
8	La Sihamu, S.IP	Islam		
9	Iksan Subur, S.Pd. M.Si	Islam		
10	Abu Karim La Tara, S.IP	Islam		
11	La Ode Kandia	Islam		
12	La Sahu Djafar	Islam		
13	Drs La Sengka La Dadu	Islam		
14	Maslan Hi. Hasan, SH, M.Si	Islam		
15	Bahar Haji, S.Pd	Islam		
16	Idhar La Masa, SE	Islam		
17	Safar Sam, SH	Islam		
18	Jasmin Djafar, S.Ag, MM	Islam		

19	Weinandus Kurama		Kristen	
20	Yavet Moloku		Kristen	
21	Leonardo Koling, SH		Kristen	
22	Adi Cheng			Kung Hu Cu

Sumber : Analisis Hasil Data Penelitian, 2011

Dari tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas elit-elit Obi berasal dari agama Islam 18 orang, agama Kristen 3 orang dan agama Kung Hu Cu 1 orang. Agama bukan satu-satunya alasan yang membuat elit terpolarisasi, tapi dengan agama yang berbeda menjadikan para elit menyatu demi memperjuangkan pemekaran daerah Kepulauan Obi. Isu-isu agama sama sekali tidak dibangkitkan atau ditonjolkan dalam pemekaran daerah, hal ini karena masyarakat Obi sadar betul dengan keyakinan agama yang selama ini dijalani. Apalagi mengingat kembali konflik agama di masa lalu di Tahun 1999, yang semua itu karena kepentingan segelintir elit yang ada di Provinsi Maluku Utara.

E. Kesimpulan

Secara geografis Obi merupakan wilayah kepulauan yang terletak di bagian selatan Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan kondisi wilayah kepulauan, maka Pulau Obi terdiri dari Obi Mayor dan Obi Minor. Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari berbagai etnis dan agama serta hubungan akulturasi dan primordial masyarakat Obi, rentang kendali yang jauh dari pusat pemerintahan merupakan faktor utama tuntutan pemekaran daerah. Dalam konteks pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi, aspek geografis cenderung membangkitkan semangat masyarakat

Obi dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk menuntut pemekaran daerah.

Sedangkan aspek etnisitas, dan ekonomi sama sekali tidak ditonjolkan dalam wacana pemekaran, karena kehidupan sosial-ekonomi, sosial-budaya masyarakat Obi sudah terikat dalam satu ikatan toleransi dan keluarga besar diantara etnis-etnis yang ada di Pulau Obi, begitu pula dalam mata pencaharian yang sebagian besar masyarakat berasal dari petani dan nelayan. Pemekaran Daerah Kepulauan Obi menimbulkan pro dan kontra dikalangan elit. Pro pemekaran berasal dari masyarakat Obi dan elit-elit Obi, sedangkan kontra pemekaran adalah elit yang berasal dari luar pulau Obi. Elite kontra pemekaran yakni Bupati Halmahera Selatan, pihak kontra mempunyai kepentingan ekonomi (usaha bisnis) di wilayah Kepulauan Obi dan memiliki 20 % saham di 3 (tiga) perusahaan yang beroperasi di Pulau Obi. Kepentingan ekonomi, menjadi dasar utama alasan tidak mau melepaskan Obi menjadi kabupaten baru.

Meskipun terjadi pro dan kontra pemekaran, ternyata dibalik itu terjalin juga konspirasi beberapa elit dalam urusan kepentingan ekonomi (usaha bisnis) di wilayah Kepulauan Obi. Konspirasi elit terjadi antara elite pro pemekaran (Abu Karim La Tara,S.IP/Camat Obi dan Hi. Subur/Pengusaha di Obi) dengan elit kontra pemekaran (Bupati Muhammad Kasuba). Kesamaan kepentingan ekonomi; keuntungan pribadi, usaha mengamankan dan mempertahankan usaha bisnis merupakan alasan utama terjadinya konspirasi antara elit. Elit pro pemekaran dalam memuluskan segala sesuatu yang berhubungan dengan usahanya harus bekerjasama dengan pihak kontra pemekaran selaku Bupati Halmahera Selatan, begitu juga sebaliknya. Elit kontra pemekaran harus

bekerjasama dengan elit Obi untuk mendapatkan dukungan agar usahanya berjalan lancar tanpa ada hambatan.

Konfigurasi elit dalam Pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Obi, ternyata terjadi perpaduan antara aspek etnisitas dan agama, sedangkan dari aspek geografis terjadi polaritas diantara elit-elit yang ada di wilayah Kepulauan Obi. Terpolarisasinya elit-elit Obi berdasarkan wilayah baik itu di wilayah Kepulauan Obi, wilayah Labuha-Bacan (Kabupaten Halmahera Selatan), dan di Ternate, menimbulkan persaingan kepentingan. Persaingan kepentingan antara kelompok elit pro pemekaran dalam hal kepentingan masing-masing elit untuk berebut pengaruh dan dukungan dari massa/masyarakat, untuk mengamankan dan mempertahankan sumberdaya-sumberdaya (*resource*) yang dimiliki serta kepentingan untuk mendapatkan distribusi kekuasaan pasca pemekaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dahl Robert, 1994. *Analisis Politik Modern*, terjemahan, Bumi Aksara , Jakarta
- Jarry David dan Jarry Julia, *Collin Dictionary of Sociology* (Glasgow: Harper Collins Publishers, 1991)
- Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Universitas Gadjah Mada, Program Pasca Sarjana (S2) PLOD.
- Jurdi Syarifuddin, 2004. *Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*. Gadjah Mada University Press.
- Keller Suzanne, 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, cet. I. CV. Rajawali, Jakarta
- _____, 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, cet. II. PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong J. Lexy, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mattei Dogan, 2003. *Elite Configuration At the Apex of Power*. Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.

- Maliki Zainuddin, 2010. *Sosiologi Politik, Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Cet. I, Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis Hanif, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Pareto Vilfredo, *The Mind and Society*, III, hal 1422-3
- Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sunarlan, "Gerakan Reformasi Politik", Tesis S2 (Yogyakarta: Program Politik Fisipol UGM, 2000).
- T.B. Bottomore, 2006. *Elit dalam Masyarakat*. Jakarta, Akbar Tanjung Institute.
- Varma SP, 1999. *Teori Politik Modern*. Cetakan. V, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Usman Husaini, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Penerbit Bumi Aksara, Bandung.
- Maluku Utara Post (Malut Post), 2011. *Akui Administrasi Lengkap Tim UI Kunjungi Obi*. Selasa, 03 Mei 2011.
- Maluku Utara Post (Malut Post), 2011. *Minta Dimekarkan Tahun ini, Warga Obi dan Taliabu Nyaris Bajak Anggota Komisi II DPR*. Kamis, 14 April 2011.
- Sumber : <http://kupang.tribunnews.com/read/artikel/42929>

TENTANG PENULIS



Bakri La Suhu, S.IP, M.A, Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar pada SD Negeri Mano-Obi Selatan Tahun 1998, MTs Alkhairaat Mano-Obi Selatan Tahun 2001, MAN Model Ternate Tahun 2004. Menyelesaikan pendidikan

tinggi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun 2008 dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011).

Pada tahun 2012, penulis kembali mengabdikan sebagai Dosen dan kemudian tahun 2013 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Tahun 2018 hingga sekarang, penulis dipercayakan untuk menduduki jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Menikah dengan Ida Kene, Amd.Keb dan dikaruniai tiga orang anak.

Beberapa artikel tulisan yang pernah di public baik jurnal Internasional terindeks Schopus maupun jurnal nasional. Buku yang penulis tulis yakni "KONFLIK PEREBUTAN RUANG HIDUP (Suatu Pendekatan Kebijakan & Konsensus) tahun 2021".



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si, Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN "Alauddin" Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU, Direktur Pascasarjana (s2) Ilmu Adminisrasi (2018-2022), dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah

Maluku Utara., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus dan Jurnal nasional, article tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443.

Buku Yang pernah di tulis : Epistimologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik (2019).

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman : Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014, Ketua FKDM Kota Ternate, Anggota Tim Pembahasan Penyerahan sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan, Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten, Ketua TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA Kota Ternate Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan pemerintahan. Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202264295, 13 September 2022

Pencipta
Nama : **Bakri La Suhu dan Abdul Halil Hi. Ibrahim**
Alamat : Jl. Pondok Pesantren RT/RW 019/06 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Ternate, MALUKU UTARA, 97718

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Bakri La Suhu dan Abdul Halil Hi. Ibrahim**
Alamat : Jl. Pondok Pesantren RT/RW 019/06 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Ternate, MALUKU UTARA, 97718

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Konspirasi Elit Dibalik Pemekaran Daerah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 9 September 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000380031

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.